

**ANALISIS KINERJA PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH
(INDIKASI *MORAL HAZARD* DI PERBANKAN SYARIAH
TAHUN 2010-2015)**



Diajukan oleh:
Hilmy Baroroh
14918018

**Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi
Program Studi Magister Ekonomi dan Keuangan
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta
Februari 2017**

**ANALISIS KINERJA PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH
(INDIKASI *MORAL HAZARD* DI PERBANKAN SYARIAH
TAHUN 2010-2015)**

**Tesis S-2
Program Magister Ekonomi dan Keuangan**



Diajukan oleh:
Hilmy Baroroh
14918018

**Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi
Program Studi Magister Ekonomi dan Keuangan
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta
Februari 2017**

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Ekonomi dan Keuangan Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

HILMY BAROROH

No. MHS. : 14918018

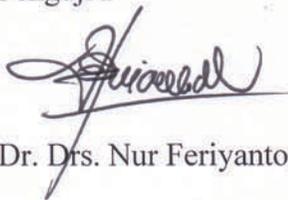
Konsentrasi : Ekonomi dan Keuangan Islam

Dengan Judul:

**ANALISIS KINERJA PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH
(INDIKASI MORAL HAZARD DI PERBANKAN SYARIAH TAHUN 2010-2015)**

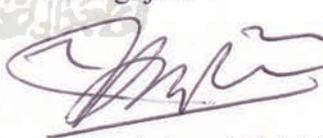
Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si.

Penguji II



Drs. Achmad Tohirin, MA., Ph.D.

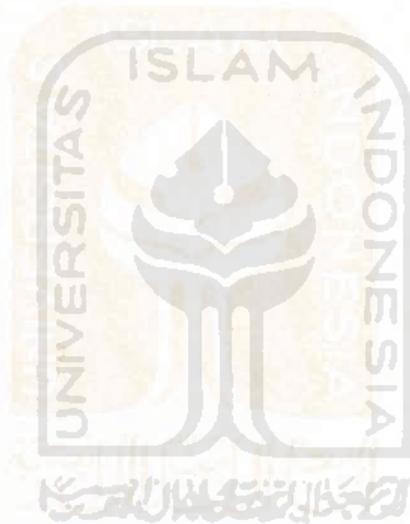
Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Zainal Mustafa EQ., MM.

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Nur Feriyanto', is written over a horizontal line.

Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si.

Pernyataan Bebas Plagiarisme

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, Februari 2017



Hilmy Baroroh



TESIS
ANALISIS KINERJA PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH
(INDIKASI *MORAL HAZARD* DI PERBANKAN SYARIAH
TAHUN 2010-2015)



Telah disetujui oleh:

Yogyakarta, 24 Februari 2017

Dosen Pembimbing,

Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa tercurah kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan Rahmat, Karunia, dan Hidayah-Nya, serta telah melimpahkan karunia terindah dalam hidup ini yaitu, nikmat Iman, Islam, dan Ihsan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Analisis Kinerja Pembiayaan Perbankan Syariah (Indikasi *Moral Hazard* Di Perbankan Syariah Tahun 2010-2015)”. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, pemimpin dan revolusioner sejati. Semoga kita tetap istiqomah memegang teguh sunnahnya dan mendapat syafaatnya di *Yaumul Qiyamah* kelak.

Tesis ini disusun dan diajukan guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Ekonomi dan Keuangan Islam pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam penyusunan tesis ini membutuhkan ketelitian, kesabaran, mental yang kuat, dan kerja keras. Banyak pihak yang terlibat dalam penyusunan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materiil. Rasa hormat dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Direktur Pascasarjana Fakultas Ekonomi, Kepala Program Studi Magister Ekonomi dan Keuangan dan Para Dosen Pengajar Program Studi Magister Ekonomi dan Keuangan.
2. Kedua orangtua, Bapak dan Ibu tercinta, serta seluruh keluarga besar, terimakasih atas doa restu, nasehat, cinta, dan kasih sayang yang selalu tercurah.

3. Bapak Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberi bimbingan ilmiah yang mencerahkan dan dengan sabar memberikan ilmu, motivasi, kritik, saran sehingga tesis ini selesai tepat pada waktunya.
4. Untuk rekan-rekan seperjuangan, Magister Ekonomi dan Keuangan Angkatan ke-10 yang menjadi pemantik semangat agar penulis menyelesaikan penelitian ini, sungguh kebersamaan yang indah dan terimakasih atas persahabatan yang luar biasa ini, semoga Allah selalu menyertai langkah-langkah kita menuju masa depan yang cerah.
5. Seluruh sahabat dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan, motivasi, inspirasi, dan membantu dalam proses penyelesaian tesis ini.

Peneliti menyadari tidak mampu membalas kebaikan Bapak, Ibu, dan segenap Sahabat yang turut membantu dalam penyusunan tesis ini. Semoga Allah selalu memberi rahmat dan hidayah-Nya kepada Bapak, Ibu dan segenap Sahabat. Peneliti berharap tesis ini dapat menjadi bahan telaah dan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Meskipun, masih banyak kesalahan dan kekurangannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, Februari 2017
Penyusun,

Hilmy Baroroh
NIM: 14918018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Pembahasan	10
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Literatur Review.....	13
2.2 Landasan Teori.....	25
2.2.1 <i>Moral Hazard</i>	25
2.2.2 <i>Profit and Loss Sharing</i> dan <i>Moral Hazard</i>	33
2.2.3 <i>Moral Hazard</i> dan <i>Non Performing Financing</i>	35
2.3 Hipotesis Penelitian.....	37
2.4 Kerangka Berfikir.....	43
BAB III: METODE PENELITIAN	47
3.1 Populasi dan Sampel	47
3.2 Sumber dan Teknis Pengumpulan Data	48
3.3 Variabel Penelitian	49
3.4 Metode Analisis Data.....	52
BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	68
4.1 Analisis Data	68
4.2 Pembahasan.....	77
BAB V: KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	89
Daftar Referensi	94
Lampiran	I

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Pembiayaan dan NPF Bank Syariah	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4.1.1 Hasil Uji Linieritas.....	69
Tabel 4.1.2 Hasil Uji Akar Unit.....	70
Tabel 4.1.3 Hasil Uji Kointegrasi	71
Tabel 4.1.4 Hasil Uji Asumsi Klasik	70
Tabel 4.1.5 Hasil Uji Multikolinieritas	73
Tabel 4.1.6 Hasil Uji Model Jangka Pendek.....	74
Tabel 4.1.7 Hasil Model Jangka Panjang.....	76
Tabel 4.2.1 <i>Moral hazard</i> di Perbankan Syariah	77
Tabel 4.2.2 FDR dan NPF Perbankan Syariah.....	86



Daftar Gambar

Gambar 2.1 Indikasi <i>Moral Hazard</i>	44
---	----



Daftar Lampiran

Lampiran 1 Data Penelitian.....	I
Lampiran 2 Uji Linieritas Data	III
Lampiran 3 Uji Stasioneritas (NPF).....	IV
Lampiran 4 Uji Stasioneritas (GDP).....	VI
Lampiran 5 Uji Stasioneritas (Inflasi).....	VII
Lampiran 6 Uji Stasioneritas (RR).....	IX
Lampiran 7 Uji Stasioneritas (RAP).....	X
Lampiran 8 Uji Stasioneritas (FDR).....	XII
Lampiran 9 Uji Kointegrasi	XIII
Lampiran 10 Uji Asumsi Klasik (Heteroskedastisitas).....	XIV
Lampiran 11 Uji Asumsi Klasik (Autokorelasi).....	XV
Lampiran 12 Uji Asumsi Klasik (Normalitas).....	XVI
Lampiran 13 Uji Asumsi Klasik (Multikolinieritas).....	XVI
Lampiran 14 Uji ECM (Jangka Pendek).....	XVII
Lampiran 15 Uji ECM (Jangka Panjang).....	XVIII



ABSTRAK

Moral hazard berkembang ke seluruh bidang salah satunya di sistem perbankan. Adanya penjaminan atas kebangkrutan bank oleh bank sentral yang menyebabkan penyalahgunaan dan ketidakjujuran pemilik dan pengurus bank. Penyaluran dan pendistribusian risiko yang kurang berhati-hati juga dapat menimbulkan tindakan yang berindikasi *moral hazard*. Sistem pendistribusian yang dilakukan oleh bank syariah dengan *profit and loss sharing* sebagai bentuk akad kongsi yang dipromosikan bank syariah ini di satu sisi memang memiliki risiko yang besar yaitu dalam hal kredit macet yang direpresentasikan dalam *Non Performing Financing* (NPF).

Pokok masalah pada penelitian ini yaitu adakah indikasi *moral hazard* dilihat dari hubungan pengaruh GDP, Inflasi, Rasio Margin Murabahah terhadap Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah, Rasio Alokasi Pembiayaan Murabahah terhadap Alokasi Mudharabah dan Musyarakah, dan FDR terhadap NPF. Penelitian ini menggunakan ECM (*Error Correction Model*) sebagai teknik analisis. Data yang digunakan adalah data Statistik Perbankan Syariah dan Badan Pusat Statistik Indonesia periode 2010-2015.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dalam jangka pendek GDP, Inflasi, Rasio Margin Murabahah terhadap Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap NPF, dan Rasio Alokasi Pembiayaan Murabahah terhadap Alokasi Mudharabah dan Musyarakah, serta FDR berpengaruh terhadap NPF namun tidak berindikasi *moral hazard*. Dalam jangka panjang Inflasi, Rasio Margin Murabahah terhadap Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap NPF, dan GDP, Rasio Alokasi Pembiayaan Murabahah terhadap Alokasi Mudharabah dan Musyarakah, serta FDR berpengaruh terhadap NPF namun hanya GDP yang memiliki indikasi *moral hazard* pada perbankan syariah.

Kata Kunci: NPF, GDP, Inflasi, Rasio Margin Murabahah terhadap Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah, Rasio Alokasi Pembiayaan Murabahah terhadap Alokasi Mudharabah dan Musyarakah, dan FDR.

ABSTRACT

The development of moral hazard attack into all fields and one of them are in Islamic banking system. The assurance bankruptcy by central bank caused misappropriation and dishonesty. Carelessness in the distribution of risk can lead to moral hazard. Distribution system carried out by Islamic banks with profit and loss sharing agreement has a huge risk in terms of non-performing loans which represented as Non Performing Financing (NPF).

The principal problem of the research: is there any indication of moral hazard seen from the influence of GDP, inflation, Margin Ratio Murabahah to mudharabah and musharakah, allocation ratio murabahah to mudharabah and musharakah, and FDR to NPF. In this research using ECM (Error Correction Model) as an analytical technique. The data used is Statistic Perbankan Sharia (SPS) and Badan Pusat Statistic (BPS) in Indonesia from 2010 to 2015.

The result stated that, in short term GDP, Inflation and margin ratio murabahah to mudharabah and musharakah does not affect the Non Performing Financing (NPF). Meanwhile, the allocation ratio of Murabahah to mudharabah, musharakah and Financing To Deposit Ratio (FDR) affect non performing financing, but it did not indicate as moral hazard. However, in long term period inflation, margin ratio murabahah to profit and loss sharing (mudharabah) and musharakah does not affect Non Performing Financing (NPF). The last two variables which are Financing to Deposit Ratio (FDR) and GDP are affecting non performing financing (NPF), but only GDP has an indications as moral hazard in Islamic banking.

Keywords: NPF, GDP, Inflation, margin ratio murabahah to profit and loss sharing (mudharabah) and musharakah, allocation ratio murabahah to mudharabah and musharakah and FDR.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1997 istilah *moral hazard* mulai kembali populer akibat adanya krisis keuangan di Asia. Kebijakan kredit bank dinilai kurang berhati-hati, sementara *back up system* yang disediakan bank sentral justru membuat bank semakin berani mengambil risiko dalam memberikan pinjaman (Morris, 1998).

Program penjaminan yang diberikan oleh IMF kepada negara-negara berkembang dinilai menjadi faktor yang memperburuk kondisi ekonomi dan menyuburkan praktek *moral hazard* karena justru menurunkan sikap kehati-hatian negara-negara tersebut dalam melawan krisis ekonomi.

Istilah *moral hazard* ini berkembang ke seluruh bidang salah satunya di sistem perbankan. Hal ini terjadi ketika semua deposito dijamin oleh penjamin bank saat terjadi kebangkrutan, ini dapat memicu deposan untuk menitipkan hartanya di bank-bank kecil yang menawarkan suku bunga lebih tinggi. Bank-bank swasta merasa aman karena Bank Indonesia bersedia memberikan jaminan ketika terjadi pelanggaran *prudential requirements* yang sewaktu-waktu terjadi. Pada akhirnya bank-bank swasta akad nekad, jaminan dari bank sentral akan disalahgunakan karena adanya ketidakjujuran dari pemilik bank atau pengurusnya. Sementara, di sisi lain hal ini juga merugikan bank-bank besar yang tidak mau memberikan suku bunga tinggi. Akibatnya seluruh elemen perekonomian harus ikut menanggung dampak dari

kondisi ini dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi (Ibrahim dan Ragimun, 2010).

Mengacu pada pernyataan tersebut, ketidakhati-hatian bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga dapat dikategorikan *moral hazard*. Dengan definisi tersebut kita juga dapat menganalisis sejumlah kasus yang ditemukan di perbankan konvensional seperti yang terjadi di Bank Mandiri yang mengalami kredit macet sebesar 2,7triliun dan adanya bank persyarikatan dalam kategori bank dalam pengawasan khusus dari sudut *moral hazard* (Nasution dan Wiliasih, 2007).

Sebagaimana hasil penelitian Eicengreen dalam Dreher (2004) terdapat dugaan kuat bahwa masalah sebenarnya terletak pada sistem perbankan dan pendistribusian risiko. Sebenarnya dalam pendistribusian bank syariah menawarkan konsep yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Bank syariah menggunakan sistem *profit and loss sharing* sebagai pengganti sistem bunga yang merupakan *determined return*.

Secara teoritis, keberadaan PLS berimplikasi pada risiko serta peluang *moral hazard* diperbankan sebab risiko menjadi tanggungan kedua pihak Anto dan Setyowati dalam Current Issues Lembaga Keuangan Syariah (2009:76). Bank syariah dan nasabah akan dipaksa untuk menyusun suatu desain kontrak yang optimal bagi kedua belah pihak, sebab keduanya akan berbagi risiko maupun hasil (Williamson, 1987). Bank syariah memiliki peran moral dan nilai Islam dalam setiap operasionalnya seharusnya mampu berperan penting melebihi regulasi dan strategi apapun dalam mengurangi problem *moral hazard*.

Sistem pendistribusian yang dilakukan oleh bank syariah dengan *profit and loss sharing* sebagai bentuk akad kongsi yang dipromosikan bank syariah ini di satu sisi memang memiliki risiko yang besar yaitu dalam hal kredit macet yang direpresentasikan dalam *Non Performing Financing* (NPF).

Kredit macet yang terjadi di perbankan syariah secara tidak langsung akan memunculkan banyak asumsi tentang seberapa giat bank syariah dalam memonitoring proses pembiayaan dari awal penyaluran dananya. Jika bank syariah mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses memilih nasabah yang memiliki *capability* baik dan selalu memantau setiap kinerja nasabahnya tentunya kenaikan NPF bisa diantisipasi. Kredit bermasalah pada nasabah bisa menjadi akibat adanya perilaku-perilaku menyimpang dari aturan yang dilakukan baik perbankan syariah maupun nasabahnya.

Seberapa besar kredit macet yang dialami oleh perbankan syariah mencerminkan seberapa besar pula bank syariah mampu membangun sistem yang optimal untuk kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank. Sistem yang optimal ini sendiri menjadi kunci agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dapat dilakukan oleh pihak bank dan nasabah. Oleh sebab itu peningkatan atau penurunan NPF menjadi cerminan seberapa optimalnya sistem operasional yang dirancang oleh perbankan syariah untuk mengantisipasi adanya tindakan-tindakan *moral hazard*.

Peningkatan pembiayaan seharusnya diikuti oleh suatu *prudential practice* sehingga tidak terjadi kenaikan NPF. Kebijakan pembiayaan bank syariah yang

kurang berhati-hati dapat menyebabkan terjadinya NPF yang berindikasi pada *moral hazard*. Seperti yang terjadi di tahun 2015, NPF bank syariah mengalami peningkatan. Oleh karena itu, di tahun ini industri perbankan syariah masih dalam proses konsolidasi sebagai dampak dari pembiayaan bermasalah yang terjadi pada 2015 (Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D Hadad dalam konferensi pers akhir tahun OJK, 2016).

Selain itu, dengan menggunakan sistem bagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*) bank syariah harus tetap memonitoring alokasi pembiayaannya. Karena hal tersebut merupakan konsekuensi dari prinsip perbankan syariah yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko.

Dalam alokasi pembiayaan sejauh ini bank syariah masih memiliki persentase yang tinggi pada akad murabahah. Hal ini dikarenakan dalam pembiayaan perbankan syariah sistem bagi hasil kurang diminati oleh masyarakat. Perbankan syariah terkesan kurang ekspansif menyalurkan dana ke sektor riil karena pada sistem ini bagi hasil dan risiko ditanggung bank dan nasabah. Seperti pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa total pembiayaan murabahah sebesar 558,985 miliar rupiah, sementara pembiayaan pada akad mudharabah 49,020 miliar rupiah dan musyarakah sebesar 271.643 miliar rupiah.

Tabel 1.1
Pembiayaan dan NPF Bank Syariah

Indikator	2014		2015		2016		Total
	Nov	Des	Nov	Des	Juli	Ags	
Mudharabah	8.608	8.424	8.003	7.979	8.094	7.912	49.020
Musyarakah	41.061	40.278	45.492	47.357	48.467	48.988	271.643
Murabahah	90.989	91.867	92.289	93.642	95.114	95.084	558.985
NPF	4.86%	4.33%	3.89%	3.49%	3,86%	3,97%	

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Laporan OJK (dalam milyar)

Pada sisi internal, FDR (Financing to Deposit Ratio) berperan dalam meningkatkan persentase NPF. Bila FDR dilakukan secara masif bisa mengakibatkan meningkatnya risiko kredit macet, tetapi bila tingkat FDR rendah maka sektor riil juga tidak akan berkembang (Poetry dan Sanrego, 2011).

Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank, oleh karena itu sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. Semakin besar kredit yang disalurkan dibandingkan dengan simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besar risiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Dengan kata lain semakin besar FDR semakin besar pula rasio NPF (Yasin, 2014). Jika memang tingkat FDR yang semakin tinggi juga mengakibatkan kenaikan NPF maka hal ini berindikasi pula adanya kurangnya sifat *prudential*

practice. Sebab sebagai bank yang berlandaskan nilai moral Islam seharusnya prinsip kehati-hatian didepankan dalam menjalankan operasionalnya.

Selain kondisi intern perbankan syariah, hal lain yang dapat mempengaruhi kelancaran suatu usaha adalah kondisi makro suatu negara. Variabel makro suatu negara salah satunya adalah *Gross Domestic Product* (GDP). GDP adalah salah satu alat untuk mengukur tingkat perekonomian suatu negara. Tingkat GDP ini juga dapat menjadi indikator *moral hazard* dari sisi makroekonomi. Indikator *moral hazard* di perbankan syariah ini terjadi jika saat NPF meningkat saat GDP meningkat. Idealnya, ketika GDP meningkat maka terjadi peningkatan transaksi ekonomi, dunia bisnis lebih menggeliat sehingga jika pada kondisi tersebut NPF meningkat mengindikasikan bank kurang berhati-hati atau kurang monitoring (Mustofa Edwin, 2007).

Kemudian, alat ukur kondisi makro lainnya adalah variabel inflasi. Jika tingkat inflasi tinggi dapat berpengaruh pada perekonomian, baik dari segi pendapatan, suku bunga, nilai tukar, dan lain sebagainya. Tingkat inflasi yang tinggi akan menurunkan tingkat pendapatan masyarakat, sehingga dapat menurunkan tingkat pengembalian pinjaman di perbankan. Pada akhirnya hal ini akan memperbesar tingkat NPF (kredit bermasalah) di perbankan pula.

Moral hazard dapat diindikasikan dengan melihat laju inflasi dengan *Non Performing Financing* (NPF). Jika inflasi turun maka diharapkan NPF juga akan mengalami penurunan. Akan tetapi, jika dalam kondisi inflasi turun namun NPF

mengalami kenaikan hal itu berarti bank kurang cermat dalam memonitoring penyaluran dananya, sehingga mengakibatkan NPF naik.

Dari sini perbankan syariah diharapkan mampu membawa pesan dan peran moral nilai Islam disamping ikut membangun ekonomi Indonesia dewasa ini. Untuk itu perlu pengkajian yang mendalam atas konsep-konsep yang selama ini dioperasionalkan, baik secara konseptual maupun aplikasinya, sehingga tercipta sistem perbankan syariah mampu berkembang di era globalisasi pada masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bermaksud menganalisis pengaruh GDP, Inflasi, Rasio *Margin Murabahah* terhadap Bagi Hasil *Mudharabah Dan Musyarakah*, Rasio Alokasi Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pembiayaan *Mudharabah dan Musyarakah*, dan FDR terhadap *Non Performing Financing (NPF)* Perbankan Syariah dengan judul **Analisis Kinerja Pembiayaan Perbankan Syariah (Indikasi *Moral Hazard* di Perbankan Syariah Tahun 2010-2015)**.

1.2. Rumusan Masalah

Adanya variabel makro yang dapat mempengaruhi tingkat NPF seperti GDP dan inflasi, dan juga faktor internal perbankan yang juga dapat menyebabkan kenaikan NPF menjadi variabel yang digunakan untuk meneliti adanya indikasi *moral hazard* pada perbankan syariah. Untuk itu berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian berfokus pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh GDP, inflasi, rasio margin murabahah terhadap bagi hasil mudharabah musyarakah, rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan mudharabah musyarakah, dan FDR terhadap NPF?
2. Apakah terdapat indikasi *moral hazard* yang timbul dari hubungan pengaruh GDP, inflasi, rasio margin murabahah terhadap bagi hasil mudharabah musyarakah, rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan mudharabah musyarakah, dan FDR terhadap NPF?
3. Bagaimana indikasi *moral hazard* yang timbul dari hubungan pengaruh GDP, inflasi, rasio margin murabahah terhadap bagi hasil mudharabah musyarakah, rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan mudharabah musyarakah, dan FDR terhadap NPF?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengetahui adanya indikator *moral hazard* di perbankan syariah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh GDP, inflasi, rasio margin murabahah terhadap bagi hasil mudharabah musyarakah, rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan mudharabah musyarakah, dan FDR terhadap NPF di Perbankan Syariah tahun 2010-2015.
2. Untuk menganalisa adanya indikasi *moral hazard* yang timbul dari hubungan pengaruh GDP, inflasi, rasio margin murabahah terhadap bagi hasil

mudharabah musyarakah, rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan mudharabah musyarakah, dan FDR terhadap NPF di Perbankan Syariah tahun 2010-2015.

3. Untuk menganalisa indikasi *moral hazard* yang timbul dari hubungan pengaruh GDP, inflasi, rasio margin murabahah terhadap bagi hasil mudharabah musyarakah, rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan mudharabah musyarakah, dan FDR terhadap NPF di Perbankan Syariah tahun 2010-2015.

1.4. Manfaat Penelitian

Setelah menentukan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada beberapa pihak yang terkait, baik bagi peneliti, praktisi, maupun akademisi. Di antara manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti
 - a. Diharapkan mampu meningkatkan kemampuan analisis peneliti dalam memahami fenomena ekonomi khususnya di dunia perbankan syariah.
 - b. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai dampak positif maupun negatif dari *profit loss sharing* dan *moral hazard* di perbankan syariah.
 - c. Diharapkan mampu memberikan semangat baru dalam rangka menggiatkan edukasi perbankan syariah kepada masyarakat.

2. Bagi Praktisi

- a. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang realistis mengenai pengaruh GDP, inflasi, rasio margin pembiayaan terhadap bagi hasil PLS, rasio pembiayaan murabahah terhadap mudharabah dan musyarakah, dan FDR terhadap NPF.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan sebagai salah satu praktisi perbankan syariah, khususnya dalam rangka peran pengurangan tingkat *moral hazard* di perbankan syariah.

3. Bagi Akademisi

- a. Diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi akademisi dalam rangka melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan indikator *moral hazard* di perbankan syariah.
- b. Diharapkan bisa menambah wawasan dan memperkaya kasanah keilmuan intelektual mengenai pengaruh GDP, inflasi, rasio margin pembiayaan terhadap bagi hasil PLS, rasio pembiayaan murabahah terhadap mudharabah dan musyarakah, dan FDR terhadap NPF di perbankan syariah.

1.5. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan hasil penelitian ini dapat dipahami secara sistematis, menyeluruh, runut, jelas dan terarah oleh pembaca, maka berikut adalah sistematika pembahasan pada penelitian ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang pengambilan topik penelitian, penentuan judul penelitian, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian, tujuan serta manfaat dari adanya penelitian, dan juga sistematika pembahasan pada penelitian yang dimaksud.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan beberapa penelitian terdahulu mengenai topik yang sama, yaitu indikator *moral hazard*. Selain itu di dibahas juga mengenai landasan teori yang mendasari penelitian ini dilakukan, serta hipotesis penelitian yang sudah diformulasikan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang diantaranya terdiri dari pemilihan populasi dan sampel, sumber dan teknik pengambilan data, definisi operasional variabel penelitian, pengujian hipotesis, serta metode dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan tentang data yang digunakan dalam penelitian, hasil dari analisis data yang dilakukan, interpretasi

terhadap hasil penelitian, serta pembahasan mengenai hasil penelitian tersebut.

BAB V : KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

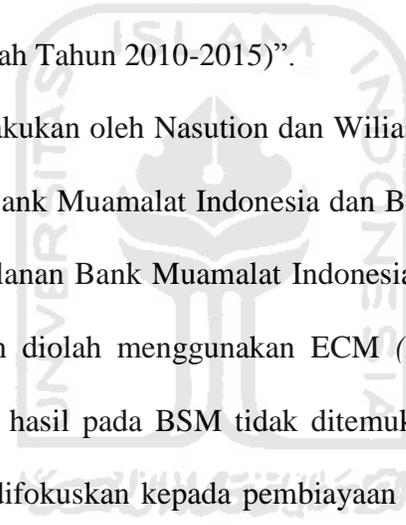
Bab ini memaparkan kesimpulan penelitian yang diambil dari hasil analisis yang sudah dilakukan sebelumnya, keterbatasan pada penelitian ini, saran bagi penelitian-penelitian selanjutnya, dan juga implikasi teoritis dari penelitian yang dilakukan tersebut.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Guna mendukung penelitian dan membedakan dengan penelitian sebelumnya, berikut akan dibahas beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis dengan judul “Analisis Kinerja Pembiayaan Perbankan Syariah (Indikasi *Moral Hazard* di Perbankan Syariah Tahun 2010-2015)”.


Penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Wiliasih (2007) menguji adanya indikasi *moral hazard* di Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Data diperoleh dari Laporan Bulanan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM), kemudian diolah menggunakan ECM (*Error Correction Model*). Penelitian ini memperoleh hasil pada BSM tidak ditemukan indikasi *moral hazard* karena pembiayaan lebih difokuskan kepada pembiayaan murabahah sehingga lebih berhati-hati dalam *maintenance*. Sedangkan pada kasus BMI terjadi indikasi *moral hazard* dilihat dari rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan PLS (mudharabah dan musyarakah) meningkatkan risiko kredit macet.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Anto dan Setyowati (2007) menggunakan data yang bersumber dari laporan Bank Indonesia tahun 2003-2007. Penelitian ini menguji tentang perbandingan indikator *moral hazard* di bank konvensional dan bank syariah dengan menggunakan metode ekonometrik ECM (*Error Correction Model*). Hasil pengujian indikasi *moral hazard* lebih banyak

terjadi di bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Pada bank konvensional seluruh variabel tidak berpengaruh dalam jangka pendek, dan dalam jangka panjang hanya variabel GDP yang memiliki indikasi *moral hazard*. Sedangkan pada bank syariah variabel Rasio *Margin Murabahah* terhadap PLS Mudharabah memiliki indikasi *moral hazard* dalam jangka pendek, dan variabel GDP, Rasio *Margin Murabahah* terhadap PLS Mudharabah, dan Rasio *Pembiayaan Murabahah* terhadap *Pembiayaan Mudharabah* menunjukkan indikasi adanya *moral hazard* di jangka panjang.

Pada penelitian kualitatif yang berjudul Ismal (2006) dengan membuat formulasi untuk investigasi perbankan syariah terhadap pembiayaan murabahah, menyatakan bahwa *moral hazard* yang terjadi pada pembiayaan murabahah dapat dimitigasi dengan adanya investigasi yang tepat untuk masa mendatang, menyalurkan lebih banyak dana ke sektor wirausaha, dan membuat formula biaya pinalti.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Wu, Chang, dan Zekiye (2003). Dalam penelitian ini menggunakan metode *Granger causality test*, kemudian *Vector Error Correction* (VEC). Menggunakan data perbankan, data makroekonomi yang direpresentasikan dengan GDP, dan data *real estate*. Semua data tersebut berasal dari *Taiwan Financial Statistical Abstracts*. Penelitian ini menyatakan jika kondisi makroekonomi dan pasar real estate baik, NPF semestinya lebih rendah. Namun jika NPF meningkat pada kondisi tersebut, maka kemacetan bank disebabkan oleh *risky lending behavior*, dimana pihak bank tidak cukup hati-hati dalam menyalurkan kredit sehingga timbul *moral hazard*.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Yasin (2014) dengan menggunakan regresi linier berganda menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, Inflasi, Rasio Pembiayaan Bagi terhadap Total Pembiayaan (MMR), dan *Margin Murabahah* berpengaruh secara parsial terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Sedangkan *Financing to deposit Ratio* (FDR), tidak berpengaruh secara parsial terhadap *Non Performing Financing* (NPF). *Gross Domestic Product* (GDP) dan Rasio Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan (MMR), berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Sedangkan Inflasi (INF) dan *Margin Murabahah* (MM) berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

Covitz dan Heitfield (1999) melakukan penelitian untuk melihat hubungan antara kekuatan dengan suku bunga pinjaman dan sekaligus risiko bank yang tidak memberikan sistem pencegahan yang efektif bagi *moral hazard* dalam hubungan dengan peminjam, dan bank dengan jaminan pemerintah. Hasil penelitian ini mengindikasikan adanya hubungan ketergantungan berdasarkan institusi dari parameter masalah *moral hazard* yang tumpang tindih. Bank dengan kekuatan pasar yang besar cenderung mengalami masalah *moral hazard* yang tinggi dengan nasabah dibandingkan sikap *moral hazard* bank terhadap jaminan pemerintah. Ditemukan juga bahwa tingkat kompetisi antar bank mengakibatkan kondisi makroekonomi yang lebih fluktuatif karena membiarkan dengan mudah terjadinya *moral hazard* dari sisi nasabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dow (2000) melihat hubungan antara teori struktur modal dan regulasi modal bank, *moral hazard*, dan teori keagenan pada tingkatan *individual trader*, *financial firm*, dan sistem keuangan secara keseluruhan. Peneliti melakukan penelitian tentang *systematic risk* yang dilihat berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dan beberapa studi kasus yang berkaitan dengan kegagalan dan krisis keuangan perusahaan dan masalah *moral hazard* yang berkaitan dengan *systematic risk*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *moral hazard* dan *leverage* (hutang) pada level *individual firm* dapat menyebabkan guncangan yang hebat bagi sistem keuangan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Bagaskara (2016) menggunakan data panel meneliti tentang hubungan antara NPF dan efisiensi biaya bank syariah di Indonesia. Menggunakan metode DEA (*Data Envelopment Analysis*) untuk efisiensi biaya dan menggunakan VAR (*Vector Auto Regression*) hubungan antara NPF dan efisiensi biaya. Hasil penelitiannya Bank Victoria Syariah (BVS) pada periode penelitian sebagai bank yang biayanya paling efisien. Efisiensi biaya rata-rata bank umum syariah adalah 0,937 atau 93,7%, hal ini juga menunjukkan bahwa bank syariah masih tidak efisien dalam mengelola biaya mendukung hipotesis bahwa bank syariah memiliki manajemen yang buruk. Temuan mengungkapkan bahwa tingkat pertumbuhan PDB, Inflasi dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki efek negatif dan signifikan terhadap NPF, sementara nilai tukar dan *Operational Efficiency Ratio* (OER) memiliki pengaruh positif dan signifikan

terhadap NPF. Di sisi lain, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2014) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi NPF. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda, hasilnya menunjukkan bahwa variabel Bank Indonesia Sertifikat Syariah (SBIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non-Performing Financing* (NPF), dan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif signifikan pada *Non-Performing Financing* (NPF). Sementara variabel Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, dan *Financing Deposit Ratio* (FDR) tidak signifikan mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF).

Padmantlyo dan Muqorobin (2011) meneliti juga tentang variabel yang mempengaruhi kredit macet. Dengan pengujian *Ordinary Least Square* (OLS) memperoleh hasil menunjukkan bahwa jumlah pendanaan Bank Islam (FDR) dan tingkat PDB mempengaruhi tingkat pendanaan bermasalah (NPF) secara signifikan. Sedang di sisi lain, tingkat kredit macet perbankan konvensional dipengaruhi oleh tingkat suku bunga secara positif dan rasio kredit atas deposit (LDR) secara negatif. Berbagai temuan ini semakin menambah bukti bagaimana sistem ekonomi Islam dan perbankan Islam dapat mengurangi dampak krisis keuangan global secara signifikan bagi masyarakat domestik suatu negara.

Holmstrom (2008) dalam penelitiannya membuat formulasi untuk menghitung besaran *moral hazard* mendapatkan penemuan bahwa untuk meminimalisir sikap *moral hazard* perlu menciptakan sistem informasi tambahan

misalnya pada akuntansi biaya dengan menggunakan informasi keagenan, perkiraan kondisi lingkungan dan disesuaikan dengan kontrak umum.

Poetry dan Sanrego (2011) menggunakan metode VAR untuk meneliti tentang faktor mikro dan makro yang mempengaruhi NPF mendapatkan hasil bahwa dalam jangka pendek, tidak ada variabel yang signifikan mempengaruhi NPL dan NPF. Dalam jangka panjang variabel yang signifikan mempengaruhi NPL adalah nilai tukar, IPI, inflasi, SBI, LDR, dan CAR dan variabel yang signifikan mempengaruhi NPF adalah lnER, lnIPI, Inflasi, SBIS, FDR_BS, dan CAR. Penelitian ini menemukan bahwa NPF perbankan syariah lebih stabil dari NPL di perbankan konvensional untuk menangani fluktuasi variabel makro dan mikro.

Penelitian yang dilakukan oleh Misra dan Dhal (2009) menggunakan regresi panel mengkaji tentang faktor NPL pada bank umum di India. Studi ini menemukan bahwa variabel kredit seperti tingkat bunga, jatuh tempo dan jaminan dan variabel tertentu bank memiliki dampak yang signifikan terhadap kredit bermasalah di hadapan guncangan ekonomi makro.

Penelitian dengan metode deskriptif analitis tentang *moral hazard* juga dilakukan oleh Ibrahim dan Ragimun (2010) menyebutkan bahwa *moral hazard* merupakan insentif yang memiliki agenda dan tersembunyi berlawanan dengan etika hukum. *Moral hazard* terjadi karena regulasi yang lemah, penjaminan simpanan, penjaminan kredit, struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, dan lemahnya disiplin pasar.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Tahun	Modelling	Hasil Penelitian
1.	Mustafa Edwin dan Ranti Wiliasih	Profit Sharing dan <i>Moral Hazard</i> dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia	2007	Metode ekonometrik ECM (<i>Error Correction Model</i>)	Pada BSM tidak ditemukan indikasi <i>moral hazard</i> karena pembiayaan lebih difokuskan kepada pembiayaan murabahah. Sedangkan pada BMI terjadi indikasi <i>moral hazard</i> dilihat dari rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan PLS (mudharabah dan musyarakah) meningkatkan risiko kredit macet.
2.	Hendrie Anto dan Desti Setyowati	Indikasi <i>moral hazard</i> dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga: (Studi Komparatif Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Tahun 2003:1-2007)	2008	Metode ekonometrik ECM (<i>Error Correction Model</i>)	Hasil pengujian indikasi <i>moral hazard</i> lebih banyak terjadi di bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional
3.	Rifki Ismal	<i>Assessing Moral Hazard Problem in</i>	2006	Formulasi untuk investigasi perbankan	<i>Moral hazard</i> yang terjadi pada pembiayaan

		<i>Murabahah Financing</i>		syariah terhadap pembiayaan murabahah	murabahah dapat dimitigasi dengan adanya investigasi yang tepat untuk masa mendatang, menyalurkan lebih banyak dana ke sektor wirausaha, dan membuat formula biaya pinalti.
4.	Wen-Chieh Wu, Chin-Oh Chang, Zekiye Selvili.	<i>Banking system, real estate markets, and non performing loans.</i>	2003	<i>Granger causality test, Vector Error Correction (VEC)</i>	Menemukan bahwa kondisi makro ekonomi (direpresentasikan dengan GDP) dan kondisi pasar <i>real estate</i> signifikan terhadap NPF. Yang berarti bank tidak cukup hati-hati dalam menyalurkan kredit.
5.	Ach. Yasin	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Non Performing Financing</i> (NPF) di Industri Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia	2014	Regresi Linier Berganda	Pertumbuhan ekonomi, Inflasi (INF), Rasio Pembiayaan Bagi terhadap Total Pembiayaan (MMR), dan <i>Margin Murabahah</i> berpengaruh secara parsial terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF). Sedangkang <i>Financing to Deposit Ratio</i>

					(FDR), tidak berpengaruh secara parsial terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF)
6.	Daniel Covitz dan Erik Heitfield	<i>Monitoring, Moral Hazard, and Market Power: a Model of Bank Lending</i>	1999	Korelasi antara kekuatan pasar dengan suku bunga pinjaman	Bank dengan kekuatan pasar yang besar cenderung mengalami masalah <i>moral hazard</i> yang tinggi dengan nasabah dibandingkan sikap <i>moral hazard</i> bank terhadap jaminan pemerintah.
7.	James Dow	<i>What is systemic risk? Moral hazard, initial shocks and propagation</i>	2000	Penelitian survey	<i>Moral hazard</i> dan <i>leverage</i> (hutang) pada level <i>individual firm</i> dapat menyebabkan goncangan yang hebat bagi sistem keuangan.
8.	Chandra Setiawan dan Bhirawa Bagaskara	<i>Non-Performing Financing (NPF) and Cost Efficiency of Islamic Banks in Indonesia Period 2012Q1 to 2015Q2</i>	2016	DEA (Data Envelopment Analysis) dan VAR (Vector Auto Regression)	Tingkat pertumbuhan PDB, <i>Inflasi</i> dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) memiliki efek negatif dan signifikan terhadap NPF, sementara nilai tukar dan <i>Operational</i>

						<p><i>Efficiency Ratio</i> (OER) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. Di sisi lain, <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF.</p>
9.	Sri Wahyuni	Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>Non Performing Financing</i> (NPF) pada Bank Umum Syariah	2014	Regresi berganda	linier	<p>Variabel Bank Indonesia Sertifikat Syariah (SBIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Non-Performing Financing</i> (NPF), dan variabel <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) berpengaruh negatif signifikan pada <i>Non-Performing Financing</i> (NPF). Sementara variabel Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, dan <i>Financing Deposit Ratio</i> (FDR) tidak signifikan mempengaruhi <i>Non Performing</i></p>

					<i>Financing</i> (NPF).
10.	Sri Padmantyo dan Agus Muqorobin	Analisis Variabel Yang Mempengaruhi Kredit Macet Perbankan Di Indonesia	2011	<i>Ordinary Least Square</i> (OLS)	Jumlah pendanaan Bank Islam (FDR) dan tingkat PDB mempengaruhi tingkat pendanaan bermasalah (NPF) secara signifikan. Di sisi lain, tingkat kredit macet perbankan konvensional dipengaruhi oleh tingkat suku bunga secara positif dan rasio kredit atas deposit (LDR) secara negatif.
11.	Bengt Holmstrom	<i>Moral Hazard and Observability</i>	2008	Formulasi <i>Moral Hazard</i>	Meminimalisir sikap <i>moral hazard</i> perlu menciptakan sistem informasi tambahan misalnya pada akuntansi biaya dengan menggunakan informasi keagenan, perkiraan kondisi lingkungan dan disesuaikan dengan kontrak umum
12.	Zakiyah D. Poetry dan Yulizar D. Sanrego	Pengaruh Variabel Makro dan Mikro terhadap NPL Perbankan Konvensional	2011	Metode VAR	Dalam jangka pendek, tidak ada variabel yang signifikan mempengaruhi NPL dan NPF.

		dan NPF Perbankan Syariah			Dalam jangka panjang variabel yang signifikan mempengaruhi NPL adalah nilai tukar, IPI, inflasi, SBI, LDR, dan CAR dan variabel yang signifikan mempengaruhi NPF adalah lnER, lnIPI, Inflasi, SBIS, FDR_BS, dan CAR.
13.	Misra dan Dhal	<i>Pro-cyclical Management of Banks' Non-Performing Loans by the Indian Public Sector Banks</i>	2009	Regresi panel	Variabel kredit seperti tingkat bunga, jatuh tempo dan jaminan dan variabel tertentu bank memiliki dampak yang signifikan terhadap kredit bermasalah
14.	Taswan Ibrahim dan Ragimun	<i>Moral Hazard dan Pencegahannya Pada Industri Perbankan di Indonesia</i>	2010	Deskriptif analitis	<i>Moral hazard</i> terjadi karena regulasi yang lemah, penjaminan simpanan, penjaminan kredit, struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, dan lemahnya disiplin pasar.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Moral Hazard

Penggunaan istilah *moral hazard* pada awalnya digunakan dalam bidang asuransi. *Moral hazard* sering dipergunakan dalam istilah bisnis asuransi, yang menjelaskan kemungkinan pemegang asuransi dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat merugikan terhadap barang yang diasuransikannya dengan harapan akan mendapatkan klaim penggantian dari perusahaan asuransi. Pemegang polis asuransi menjadi tidak hati-hati (*imprudent*) karena bila pemegang polis mengalami kerugian akan ditanggung oleh perusahaan asuransi (Covitz dan Heitfield, 1999) . Dalam kamus Inggris makna *moral hazard* diterangkan sebagai *the hazard arising from the uncertainty and honesty of the insured*. Sebagai contoh: seorang pengusaha mengikuti asuransi untuk gedung tokonya. Ketika dia terjepit hutang dan sudah tiba masa jatuh tempo, dia membakar sendiri tokonya untuk mendapatkan ganti rugi atas tokonya. Dia melakukan ketidakjujuran dan jalan pintas untuk mendapatkan ganti rugi dari asuransi.

Moral hazard terjadi akibat seorang individu atau lembaga tidak konsekuen secara penuh dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, dan karenanya cenderung untuk bertindak kurang hati-hati untuk melepas tanggung jawab atas konsekuensi tindakannya atas pihak lain.

Pengambilan risiko perbankan yang bersifat spekulatif ketika bank tidak sehat, dapat dianggap juga sebagai masalah *moral hazard*. Kata *moral hazard*

kemudian dipergunakan dalam perspektif perbankan yang merujuk pada perilaku pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) (Ibrahim dan Ragimun, 2010).

Perilaku pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) misalnya pihak bank (pemegang saham dan manajemen) atau debitur perbankan yang menciptakan insentif untuk memiliki agenda dan tindakan tersembunyi yang berlawanan dengan etika bisnis dan hukum yang berlaku untuk keuntungan dirinya juga dapat disebut *moral hazard* (Luiz, Silva dan Masaru, 2001). Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut atas nama korporasi, atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi, baik diri sendiri atau bersama-sama.

Krugman (1999) menyebutkan bahwa konsep *moral hazard* telah luas dipergunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku debitur (*borrower*) dan pemberi kredit (kreditur/bank) yang berani mengambil risiko tinggi selama krisis keuangan terjadi di Asia Tenggara pada tahun 1997 -1998.

2.2.1.1 Moral Hazard di Industri Perbankan

Moral hazard juga terjadi akibat adanya *asimetry information* dan *adverse selection*. Kedua hal ini sangat biasa terjadi di dalam *financing contracts*, bahkan merupakan *built in character* (Miskhin,2001). Dalam sistem keuangan untuk mendapatkan informasi yang benar-benar *symmetry* memang sangat sulit, sebab *financing contracts* merupakan *incomplete contract*. Sehingga *asimetry information* ini mengakibatkan *adverse selection*, dan pada akhirnya dapat melahirkan *moral hazard*.

Pada dunia perbankan sendiri sudah sering terjadi tindakan yang berindikasi pada *moral hazard*, baik di perbankan konvensional maupun perbankan syariah. *Moral hazard* pada dunia perbankan dibedakan menjadi 2 tingkatan. Pertama, *moral hazard* pada tingkat bank dan kedua adalah *moral hazard* di tingkat nasabah. *Moral hazard* di tingkat bank dapat dibedakan menjadi beberapa (Nasution dan Wiliasih, 2007), diantaranya:

- 1) *Moral hazard* pada penyaluran dana pihak ketiga, yaitu *risk lending behavior* yang pada akhirnya menimbulkan *adverse selection* berujung pada *moral hazard* di tingkat nasabah. Ini juga disebut dengan *moral hazard* tidak langsung mengacu pada pengertian *moral hazard* menurut Dreher (2004).
- 2) *Moral hazard* ketidakhati-hatian bank dalam penyaluran dana karena adanya penjaminan simpanan dari pemerintah maupun dari lembaga penjamin simpanan, hal ini juga termasuk *moral hazard* langsung mengacu pada pengertian *moral hazard* menurut Dreher (2004).
- 3) *Moral hazard* juga terjadi ketika bank menyalurkan dana yang tidak mencerminkan fungsi bank sebagai intermediasi, contohnya: ketika bank tidak memiliki prosentase yang banyak dalam penyaluran dana ke sektor riil.
- 4) *Moral hazard* ketika bank memberikan *cost of fund* yang rendah dan menerapkan tingkat yang tinggi, juga termasuk dalam kategori *moral hazard* dan lainnya.

Masalah mendasar yang ada di perbankan ketika mengalami perkembangan yang pesat kurang didukung dengan keahlian yang memadai

para manajer pemilik bank. Sebab lainnya, adanya ketentuan penurunan *reserve requirement* maka bank-bank memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah kreditnya secara luar biasa. Kedua hal ini menimbulkan booming pada sektor perbankan berupa ekspansi kredit besar-besaran yang kemudian menyebabkan inflasi tinggi. Kondisi semacam ini sangat berpotensi munculnya kecenderungan terjadinya penyimpangan dalam industri perbankan, berupa *moral hazard* (Dow, 2000).

Kemudian karena jumlah uang beredar sangat tinggi menyebabkan *over heating*, akhirnya pemerintah melakukan kebijakan uang ketat (*tight money policy*). Kebijakan ini menunjukkan kelemahan dari sektor perbankan, yaitu hampir semua bank memiliki *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau ratio antara jumlah kredit yang disalurkan bank dibagi dengan jumlah dana pihak ketiga (DPK) di atas 100 persen. Berubahnya kebijakan ini kemudian mengakibatkan beberapa bank kolap. Salah satu penyebabnya adalah karena *moral hazard* bankir, depositan ataupun pemiliknya.

Menurut Ibrahim dan Ragimun (2010) dengan memperhatikan penyebab-penyebab *moral hazard* dapat diidentifikasi masalah yang muncul dari *moral hazard*, antara lain:

- 1) *Moral hazard* pemegang saham (bank) kepada depositan. Hal ini dimanifestasikan dengan penempatan dana pada proyek-proyek yang berisiko tinggi tanpa memperhatikan kepentingan depositan. Bank dikatakan melakukan *adverse selection*. Ketika proyek tersebut gagal hal itu akan mengkhawatirkan

deposan karena klaim deposan tidak akan terbayarkan. Namun jika proyek tersebut berhasil pemegang saham tentu akan mendapat pembagian keuntungan yang lebih besar. Menurut Scott (2000) terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:

Adverse selection, yaitu pemegang saham dan orang-orang di dalamnya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek proyek-proyek perusahaan. Dan akan mempengaruhi keputusan untuk menyampaikan informasi kepada deposan dalam lingkup kepentingan pemegang saham saja. Kedua *moral hazard*, yaitu bahwa pemegang saham dapat melakukan tindakan yang tidak diketahui di luar kontrak dan melanggar etika dan norma, sebab tidak semua kegiatan pemegang saham diketahui oleh deposan karena kurangnya informasi yang diberikan dari pemegang saham dan pihak-pihak di dalam bank kepada deposan.

- 2) *Moral hazard* pemegang saham terhadap penjamin simpanan. Bank yang memiliki Bank yang mempunyai sumber dana publik atau hutang relatif tinggi memiliki dorongan kuat untuk menempatkan dana pada investasi yang berisiko tinggi. Dalam hal ini bank tidak perlu lagi memonitor peminjam, karena *monitoring* didelegasikan ke lembaga penjamin simpanan. Jika investasi yang berisiko tinggi itu gagal, maka lembaga penjamin yang paling besar menanggungnya atau membayar simpanan pihak deposan.
- 3) *Moral hazard* manajer terhadap pemegang saham. Manajer bank dapat melakukan *moral hazard* karena manajer bukan pemilik, bukan penanggung

risiko namun mereka adalah pengambil keputusan bisnis di lembaga perbankan. Manajer dapat mengambil keputusan yang berisiko tinggi, pada umumnya risiko tinggi potensi *return* juga tinggi. Bila keputusan berhasil mendatangkan *return* tinggi maka manajer itu akan dinilai berkinerja tinggi dan konsekuensinya adalah kompensasi materiil dan non materiil. Namun, bila keputusan gagal maka penanggung risiko adalah pemegang saham. Menurut Scott (2000), *moral hazard* manajer bank terhadap pemegang saham, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh manajer bank tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham. Sehingga manajer bank dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma tidak layak dilakukan.

- 4) *Moral hazard* pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas. Tipe *moral hazard* ini terjadi ketika konsentrasi kepemilikan bank relatif tinggi. Pada konsentrasi kepemilikan tinggi, konflik keagenan bergeser dari pemegang saham dengan manajer ke pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Manajemen akan tunduk pada kepentingan pemegang saham mayoritas, sehingga pemegang saham mayoritas bisa mengendalikan manajemen atau manajer secara *powerful* untuk kepentingannya atas beban pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas bisa melakukan tindakan demi kepentingan tersembunyi yang bertentangan dengan etika bisnis atas beban pemegang saham minoritas. Bila

ini dilakukan, maka terjadi *moral hazard* pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas.

- 5) *Moral hazard* peminjam (debitur) terhadap bank. *Moral hazard* ini biasanya disebabkan karena asimetri yang sangat tinggi. Pengetahuan yang sedikit dan kurangnya informasi tentang kemampuan debitur untuk membayar menjadi masalah utama. Pada tingkat asimetri informasi yang tinggi, bank tidak dapat mendesain kontrak yang dapat mengamankan secara penuh dana yang ditempatkan pada debitur. Secara prosedural pemberian kredit memang telah melalui proses analisis yang cermat, bahkan untuk saat ini keputusan pemberian kredit dilakukan oleh komite perkreditan bukan oleh orang tertentu atau analis kredit. Namun demikian, peminjam dapat berubah perilakunya setelah mendapatkan pinjaman bank misalnya dengan memilih kegiatan yang tidak disetujui oleh bank, misalnya digunakan untuk bisnis yang berisiko sangat tinggi. Kredit tersebut akan memberikan manfaat melebihi tingkat bunga yang dibayarkan, namun bila usaha debitur bangkrut maka bank yang ikut menanggungnya.

Mishkin (2001), permasalahan *moral hazard* peminjam (debitur) terhadap bank tersebut juga disebabkan karena asimetri informasi. Dua permasalahan pokok yakni terkait *adverse selection* dan *moral hazard*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Adverse selection dimaksudkan sebagai satu bentuk masalah asimetri informasi yang terjadi sebelum transaksi keuangan dilakukan, karena

peminjam dengan kualitas yang rendah (memiliki resiko kredit tinggi), pada umumnya akan mencari pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi.

Moral hazard, merupakan permasalahan asimetri informasi yang terjadi sesudah transaksi kredit dilakukan. Hal ini memberikan kedudukan kepada pemberi kredit/bank untuk berada dalam posisi penerima resiko dari usaha yang dilakukan pihak peminjam. Permasalahan *moral hazard* dapat terjadi, karena peminjam memperoleh keuntungan untuk mengalihkan proyeknya pada proyek beresiko tinggi, yang tidak dikehendaki oleh pemberi pinjaman. Oleh karena itu, apabila berhasil dapat memberikan keuntungan besar, tetapi apabila mengalami kegagalan akan ditanggung oleh pemberi pinjaman (kredit yang diberikan tidak kembali).

- 6) *Moral hazard* peminjam (debitur) terhadap lembaga penjamin kredit atau lembaga asuransi kredit. Lembaga perbankan dapat melakukan transfer risiko kredit melalui penjaminan kredit. Penjaminan kredit adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada kreditur (bank) atas kredit atau pembiayaan kepada debitur akibat tidak terpenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan bank. Dengan demikian penjaminan kredit merupakan pelengkap perkreditan yang menitikberatkan pada pengambilalihan kewajiban debitur (sebagai pihak terjamin) dalam hal yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada bank (sebagai penerima jaminan) sesuai waktu yang diperjanjikan.

Tujuan penjaminan kredit adalah untuk mengamankan kepentingan terjamin dari sisi penggantian agunan dan kepentingan penerima jaminan dalam menyalurkan kredit. Persoalannya, semakin tinggi *plafound* penjaminan kredit, akan semakin tinggi *moral hazard* debitur. Sebaliknya semakin kecil *plafound* penjaminan atau berarti semakin besar nilai agunan kredit pihak peminjam, maka debitur semakin hati-hati atau semakin kecil *moral hazard*. Dengan penjaminan kredit, debitur akan berupaya mendapatkan pinjaman yang berisiko tinggi secara berlebihan. Debitur yang dijamin akan melakukan penyimpangan sebagai konsekuensi bahwa kegagalan debitur juga kegagalan kredit. Kegagalan kredit akan ditanggung oleh lembaga penjamin. Hal yang sama bisa terjadi dalam hal terdapat asuransi kredit. Penjaminan kredit dengan asuransi kredit adalah dua hal yang berbeda. Misi asuransi kredit yang utama adalah mengganti kerugian jika terjadi kerugian. Tujuan utama asuransi kredit untuk melindungi kepentingan pihak tertanggung atas kerugian yang mungkin terjadi. Meskipun berbeda antara penjaminan kredit dengan asuransi kredit, namun keduanya memberikan insentif bagi debitur untuk melakukan *moral hazard* atas beban lembaga tersebut.

2.2.2 Profit and Loss Sharing dan Moral Hazard

Konsep bagi hasil yang terdapat di bank syariah dapat dianalisis dengan menggunakan alat ukur *index sharing* berdasarkan preferensi pihak yang melakukan kontrak (Muljawan, 2004). Diasumsikan shahibul maal sebagai *principal*, dan

mudharib sebagai agen, dengan asumsi bahwa shahibul maal mengoptimalkan *return* yang didapat setelah dikurangi biaya mudharib. Mudharib juga mengoptimalkan pendapatannya atas *opportunity cost* yang dialokasikan (Nasution dan Wiliasih, 2007).

Dari pandangan syariah, skim yang dikehendaki sebenarnya adalah *Profit and Loss Sharing* (PLS) sebab model inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menjadi mudharib dari Siti Khadijah r.a. Namun dari segi praktik perbankan sulit menemukan mudharib yang kualitas pribadinya seperti Rasulullah SAW. Hal ini menyebabkan masalah *moral hazard* di sisi mudharib. Semuanya mengambil asumsi bahwa pada lembaga keuangan syariah menggunakan sistem PLS karena memang mempunyai dampak positif bagi pembangunan. Namun faktanya di lapangan dalam penyaluran dana kepada sektor usaha menunjukkan ada beberapa usaha yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Bank sebagai al-Mal tahap kedua (pemegang amanah dari al-Mal tahap pertama) menghadapi kesulitan untuk mengakui biaya-biaya usaha yang dikeluarkan para nasabah (mudharib). Padahal biaya-biaya yang sulit diverifikasi inilah yang menjadi pengurang seluruh pendapatan yang akan dibagihasilkan (Karnaen dan Hendri, 2007).

Meskipun prinsip syariah dalam perbankan syariah berlandaskan dari nilai-nilai moral Islam sebagaimana lembaga kegiatan perekonomian lainnya, perbankan syariah juga tidak terlepas dari masalah korupsi (Gunawan, 2005), termasuk di dalamnya masalah *moral hazard* yang dapat dipicu oleh *adverse selection*. Seperti halnya bank konvensional, *mortal hazard* pada bank syariah dibedakan menjadi dua,

yaitu *moral hazard* pada sisi bank dan *moral hazard* pada sisi nasabah. *Moral hazard* pada bank terjadi ketika bank syariah sebagai mudharib kurang berhati-hati menyalurkan dana sehingga berpotensi *moral hazard* pada nasabah pembiayaan dan mengalami kerugian. *Moral hazard* lainnya terjadi saat bank tidak membayarkan bagian bagi hasil shahibul maal seperti perjanjian di awal. Kegiatan bank tidak mentaati prinsip-prinsip Islam juga dapat dikategorikan *moral hazard* pada perbankan syariah.

Di sinilah pentingnya untuk diterapkan secara utuh prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengharuskan untuk berperilaku efektif dan efisien (Alqur'an surah Al-Isra' ayat 26-27):

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا . إِنَّ الْمُبْذِرِينَ

كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا .

26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

2.2.3 Moral Hazard dan Non Performing Financing

Non performing financing atau disebut juga dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada konvensional dapat menimbulkan masalah bagi pemilik bank, pemilik deposito, dan juga kepada kondisi ekonomi pada umumnya. Untuk pemilik dana dengan semakin tingginya NPF/NPL mereka tidak menerima *return* pasar dari *capital* mereka. Kemudian untuk nasabah deposito mereka tidak akan mendapatkan *return* pasar dari deposito atau tabungan mereka. Pada akhirnya, bank membagi kegagalan kredit mereka dengan nasabah mereka dengan cara menekan tingkat bunga. Dalam kasus yang lebih ketika bank bangkrut deposan akan kehilangan aset atau dihadapkan pada penjaminan yang tidak seimbang. Bank juga akan menerapkan tingkat bunga tinggi kepada debitur untuk membagi risiko. Tingkat bunga deposito yang rendah suku bunga yang tinggi akan menekan pasar keuangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. NPL atau NPF akan mengakibatkan jatuhnya sistem perbankan, memperkecil ruang gerak pasar saham, bahkan mengakibatkan kontraksi pada perekonomian (Wiliasih dan Nasution, 2007).

Beberapa peneliti terdahulu telah mengkaji hubungan antara kredit macet (NPF dan NPL) dengan *moral hazard* yang terjadi di dunia perbankan, antara lain: Wu, Chang, dan Zekiye menyatakan jika kondisi makroekonomi dan pasar *real estate* baik, NPL semestinya lebih rendah. Namun jika NPL meningkat pada kondisi tersebut, maka kemacetan bank disebabkan oleh *risky lending behavior*, dimana pihak bank tidak cukup hati-hati dalam menyalurkan kredit sehingga timbul *moral hazard*.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustafa Edwin N. dan Ranti Wiliasih (2007) menguji adanya indikasi *moral hazard* di Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini memperoleh hasil pada BSM tidak ditemukan indikasi *moral hazard* karena pembiayaan lebih difokuskan kepada pembiayaan murabahah sehingga lebih berhati-hati dalam *maintenance*. Sedangkan pada kasus BMI terjadi indikasi *moral hazard* dilihat dari rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan PLS (mudharabah dan musyarakah) meningkatkan risiko kredit macet.

Daniel Covitz dan Erik Heitfield (1999) melakukan penelitian untuk melihat hubungan antara kekuatan dengan suku bunga pinjaman dan sekaligus risiko bank yang tidak memberikan sistem pencegahan yang efektif bagi *moral hazard* dalam hubungan dengan peminjam, dan bank dengan jaminan pemerintah. Hasil penelitian ini mengindikasikan adanya hubungan ketergantungan berdasarkan institusi dari parameter masalah *moral hazard* yang tumpang tindih. Bank dengan kekuatan pasar yang besar cenderung mengalami masalah *moral hazard* yang tinggi dengan nasabah dibandingkan sikap *moral hazard* bank terhadap jaminan pemerintah. Ditemukan juga bahwa tingkat kompetisi antar bank mengakibatkan kondisi makroekonomi yang lebih fluktuatif karena membiarkan dengan mudah terjadinya *moral hazard* dari sisi nasabah.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Gross Domestic Product (GDP)

Indikasi *moral hazard* timbul jika pada saat GDP meningkat NPF juga ikut meningkat. Sebab, saat GDP meningkat idealnya terjadi peningkatan transaksi

ekonomi, sektor ekonomi sedang pada posisi menggeliat. NPF seharusnya menurun karena kondisi ekonomi sedang membaik. Namun, jika pada saat kondisi ekonomi meningkatkan dan NPF juga ikut meningkat maka hal itu berindikasi bank syariah kurang hati-hati dalam menyalurkan dan memonitoring dananya.

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anto dan Setyowati (2008), bahwa dalam hasil olah data untuk jangka pendek GDP tidak berpengaruh NPF dan untuk jangka panjang GDP berpengaruh terhadap NPF. Hal ini berarti bahwa dalam jangka pendek indikasi *moral hazard* tidak tampak, tetapi dalam jangka panjang indikasi *moral hazard* tampak.

Dari penjelasan dan hasil penelitian terdahulu di atas seharusnya ketika GDP meningkat NPF mengalami penurunan agar tidak berindikasi pada *moral hazard*, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H1: GDP (*Gross Domestic Product*) berpengaruh negatif terhadap NPF (*Non Performing Financing*)

2.3.2 Inflasi

Tingkat inflasi dan NPF berbanding lurus artinya setiap ada kenaikan/penurunan inflasi maka akan menaikkan/menurunkan rasio dari NPF. Inflasi yang tinggi akan berdampak terhadap naiknya suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) dan secara tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap suku bunga di perbankan karena BI Rate digunakan sebagai acuan tingkat bunga yang ditawarkan perbankan kepada nasabah. Tentunya ini akan mempengaruhi penyaluran DPK dan risiko kenaikan kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Hal ini sesuai

dengan penelitian yang dilakukan oleh Yasin (2014, bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Poetry dan Sanrego (2011) juga memperoleh hasil bahwa variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap NPF.

Moral hazard dapat diindikasikan dari melihat laju inflasi dengan NPF. Apabila inflasi mengalami penurunan maka diharapkan NPF juga akan ikut turun. Tetapi apabila inflasi menurun dan rasio NPF justru meningkat berarti terdapat indikasi *moral hazard* dalam penyaluran dana dari DPK dan juga kurangnya monitoring perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan kepada nasabah, sehingga hipotesis yang muncul adalah:

H2: Inflasi berpengaruh positif terhadap NPF

2.3.3 Rasio Margin Murabahah terhadap Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah

Pada perbankan syariah sistem *profit and loss sharing* merupakan landasan utama dan menjadi unggulan dalam membuat produk perbankan. Begitu juga *profit and loss sharing* yang berkaitan dengan penyaluran dana. Perbankan syariah akan menerapkan strategi yang kaitannya dengan tanggung jawab debitur dalam menjalankan kewajibannya terhadap perbankan.

Perbankan akan menerapkan nisbah yang akan memberikan *return* tinggi terhadap pembiayaan yang berisiko tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko *moral hazard* pada debitur-debitur yang kurang bertanggung jawab. Semakin

tinggi *return* yang ditetapkan maka semakin baik perbankan syariah mengantisipasi terjadinya *moral hazard*.

Hal ini didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Wiliasih (2007) bahwa pada Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yaitu rasio *return* pembiayaan memiliki koefisien negatif sesuai dengan hipotesisnya yang berarti rasio *return* pembiayaan *profit sharing* lebih tinggi sehingga idealnya NPF akan turun.

Semakin tinggi rasio *margin* murabahah terhadap bagi hasil mudharabah dan musyarakah maka NPF perbankan syariah akan semakin rendah. Maka hipotesis dapat ditulis sebagai berikut:

H3: Rasio *margin* murabahah terhadap *return* mudharabah dan musyarakah berpengaruh negatif terhadap NPF.

2.3.4 Rasio Alokasi Pembiayaan Murabahah terhadap Pembiayaan Mudharabah Musyarakah.

Dalam menyalurkan dananya perbankan syariah tentunya harus mengedepankan *prudential banking* yaitu prinsip kehati-hatian karena hal ini menyangkut fungsi perbankan sebagai intermedator. Di samping itu perbankan juga perlu berhati-hati menghadapi risiko di masa depan berkaitan dengan dana yang disalurkan kepada debitur.

Risiko ini terjadi diduga karena masalah sebenarnya adalah pada sistem perbankan dan pendistribusian risiko penelitian Eicengreen dalam Dreher dalam Setyowati (2007). Dalam pendistribusian risiko, bank syariah menawarkan *profit and*

loss sharing yang dianggap lebih baik dari pada pendistribusian risiko oleh bank konvensional. Oleh sebab itu, ketika bank syariah memberikan pembiayaan dengan risiko tinggi ada dilakukan monitoring dari awal kepada nasabah sehingga indikasi *moral hazard* dapat diminimalisir.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiliasih (2007) bahwa dalam kondisi jangka pendek maupun jangka panjang alokasi pembiayaan murabahah dan mudharabah musyarakah tidak berpengaruh terhadap NPF pada BSM dan BMI. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi indikasi *moral hazard* pada kedua bank tersebut.

Sifat kehati-hatian perbankan syariah dalam menyalurkan dananya menjadi alasan untuk menghindari kemacetan pada pembiayaan, dimana pada beberapa kasus kredit macet ini dapat mengindikasikan terjadinya *moral hazard*. Jadi semakin banyak alokasi pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah, semakin tinggi pula sikap kehati-hatiannya dalam mengalokasikan dana, sehingga rasio alokasi pembiayaan terhadap NPF juga semakin turun. Dan hipotesis yang dapat diambil adalah:

H4: Rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan mudharabah musyarakah berpengaruh negatif terhadap NPF.

2.3.5 Financing To Deposit Rasio (FDR)

Menurut Muhammad (2004:17), penyaluran pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Variabel ini diwakili oleh *Financing To Deposit Ratio* (FDR). *Finance To Deposit Ratio* (FDR)

merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah.

Rasio *finance to deposit ratio* (FDR) dipergunakan untuk mengukur sejauh mana dana pinjaman yang berhasil dikerahkan oleh bank kepada nasabah peminjam yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka *Finance To Deposit Ratio* (FDR) suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang nilai *Finance To Deposit Ratio* (FDR) lebih kecil. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya *Finance To Deposit Ratio* (FDR) ini ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 110%. Itu artinya bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%.

Menurut Mulyono (1995), rasio FDR merupakan rasio perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat (kredit) dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank (Dendawijaya, 2001). Bila FDR dilakukan secara masif bisa mengakibatkan meningkatnya risiko kredit macet, tetapi bila tingkat FDR rendah maka sektor riil juga tidak akan berkembang.

Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank, oleh karena itu sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. Semakin besar kredit yang disalurkan dibandingkan dengan simpanan masyarakat pada suatu bank membawa

konsekuensi semakin besar risiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Dengan kata lain semakin besar FDR semakin besar pula rasio NPF. Seperti yang dikemukakan oleh Misra dan Dahl (2009) bahwa FDR berpengaruh positif terjadinya NPL.

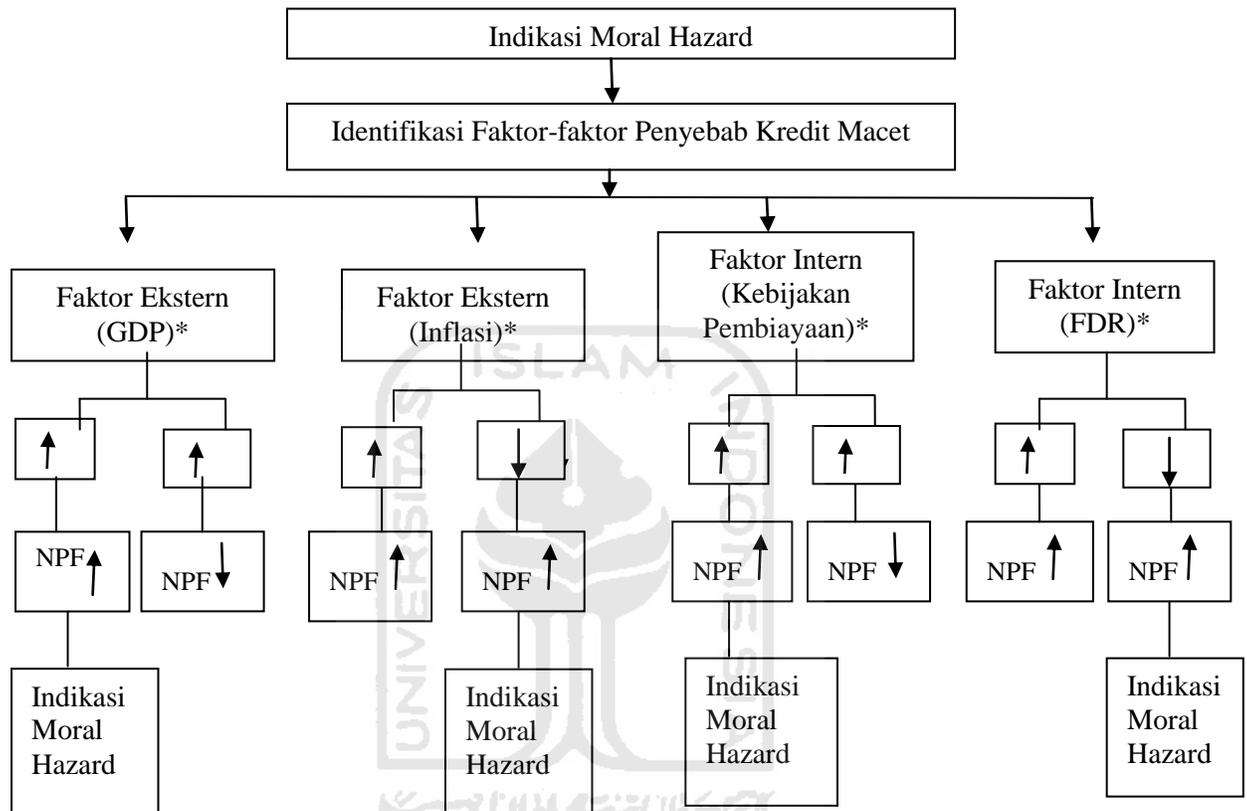
Namun, dana yang disalurkan perbankan syariah tentunya harus diikuti oleh *prudential banking* yang ketat pula agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan pada prosedur pembiayaan yang dijalankan. Jika kehati-hatian tersebut dilakukan tingkat kredit macet pada penyaluran dana yang tinggi akan dapat diminimalisir. Indikasi *moral hazard* timbul jika ketika FDR turun NPF justru cenderung naik. Dari variabel FDR diharapkan ketika FDR naik maka NPF naik karena kedua rasio ini bebanding lurus, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H5 : FDR berpengaruh positif terhadap NPF.

2.4 Kerangka Berfikir

Di bawah ini terdapat gambar yang menjelaskan kerangka pemikiran pada penelitian ini, sebagai berikut:

Gambar 2.1

Indikasi Moral Hazard

Keterangan: ↑ = naik (variabel mengalami kenaikan)

↓ = turun (variabel mengalami penurunan)

* = variabel independen yang mempengaruhi NPF

Variabel makro GDP merupakan salah satu elemen penting dalam pengukuran pendapatan negara. Pendapatan negara dapat dikatakan mengalami peningkatan ketika produksi negara meningkat dilihat dari persentase GDP yang meningkat. Pada saat pendapatan negara meningkat daya beli masyarakat pun meningkat. Masyarakat

dengan daya beli tinggi ini menjelaskan bahwa perekonomian di masyarakat sedang meningkat sehingga memiliki potensi bayar lebih tinggi atas pinjaman bank. Namun, ketika pada kondisi masyarakat memiliki daya bayar tinggi atas pembiayaan yang diberikan oleh bank tapi justru kredit macet yang direpresentasikan dengan NPF (*Non Performing Financing*) bank meningkat, hal itu memunculkan adanya indikasi bahwa masyarakat yang diberi pembiayaan oleh bank kurang sadar untuk melakukan pembayaran atas hutangnya terhadap bank. Dan hal ini memunculkan adanya indikasi *moral hazard* pada penyaluran dan pengembalian serta pembayaran pada pembiayaan.

Kemudian, apabila inflasi mengalami penurunan maka diharapkan NPF juga akan ikut turun karena rasio antara inflasi dan NPF berbanding lurus. Pada saat inflasi naik, suku bunga yang ditetapkan BI (Bank Indonesia) naik, secara tidak langsung suku bunga ini akan mempengaruhi suku bunga yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah baik di bank konvensional maupun *equivalen rate* yang ada di bank syariah dan hal ini menghambat penyaluran dana pada DPK serta berisiko menaikkan kredit macet. Sedangkan, pada saat NPF turun, suku bunga turun, harusnya NPF menurun karena nasabah memiliki kesempatan membayar pembiayaan dengan suku bunga yang rendah terhadap bank atau hal ini berarti pula masyarakat memiliki potensi daya bayar lebih tinggi atas pinjaman ketika inflasi menurun.

Selanjutnya, ketika bank memiliki kebijakan atas seberapa besar pengalokasian dana dan seberapa besar *return* yang diberikan kepada nasabah menggunakan prinsip kehati-hatian. Dan semua itu dipertimbangkan berdasarkan

risiko atas masing-masing pembiayaan yang berbeda-beda. Namun, ketika bank menyalurkan dana terhadap nasabah tersebut akan muncul fakta-fakta di lapangan yang sulit dihindari seperti minimnya insiatif nasabah mematuhi kontak yang sudah disepakati di awal. Ini bisa diakibatkan kurangnya rasa tanggung jawab nasabah untuk melakukan pembayaran pembiayaan bank dan memicu tinggi kredit macet pada bank.

Selain itu, pada saat FDR tinggi yang berarti likuiditas bank rendah dan dana yang disalurkan pada pembiayaan cukup banyak, seharusnya juga memacu tingkat pengembaliannya tinggi pula, walaupun di sisi lain potensi NPF juga akan ikut meningkat. Namun, jika pada kondisi rasio FDR turun, yang berarti dana yang disalurkan pada pembiayaan tidak banyak namun berakibat pada NPF yang cenderung naik kondisi seperti ini menimbulkan indikasi adanya penyimpangan yang bisa dilakukan oleh nasabah untuk membayarkan pembiayaan yang telah diberikan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan tingkat eksplansinya, penelitian ini termasuk dalam penelitian multivarian, yaitu penelitian yang menggunakan lebih dari satu variabel. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen dan lima variabel independen (J Supranto, 2003).

Selain multivarian, penelitian ini juga memiliki sifat kuantitatif, yaitu mempunyai karakteristik menggunakan data yang berupa angka-angka, berorientasi melihat hubungan variabel yang diteliti, menguji teori, dan mencari generalisasi yang bernilai prediktif (Idrus, 2009).

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2002). Kemudian sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang ada di Indonesia yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah dan Direktori Perbankan Indonesia.

Sedangkan pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode non probabilitas berdasarkan pertimbangan (*judgment sampling*) yaitu tipe pemilihan sampel secara tak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan

pertimbangan tertentu (d disesuaikan dengan masalah/tujuan penelitian). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan syariah yang ada di Indonesia, baik Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah. Sementara untuk periode penelitiannya adalah dari tahun 2010-2015.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanasi, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara suatu variabel dengan variabel lain (Sugiyono, 2002). Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui sumber kedua, biasanya data ini sudah siap pakai dan dipublikasikan untuk diketahui masyarakat (Widarjono, 2009). Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari:

- 1) Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasi oleh OJK dan Bank Indonesia
- 2) Badan Pusat Statistik (BPS)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi menurut (Arhami, 2005) adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih *actual* sesuai dengan masalah penelitian.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Varibel dependen pada penelitian ini adalah *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kualitas aset sebuah bank. Perhitungan NPF adalah (Kasmir, 2005:67):

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

NPF merupakan rasio yang dihitung dengan satuan persentase dan diperoleh dari laporan bulanan dari publikasi laporan Bank Indonesia. NPF dihitung dengan satuan persen (%).

3.3.2 Variabel Bebas (*Variable Independent*)

3.3.2.1 Gross Domestic Product (GDP)

GDP adalah produk barang dan jasa total yang dihasilkan dalam perekonomian suatu negara di dalam masa satu tahun. GDP didalamnya merupakan pendapatan faktor produksi milik bangsa Indonesia yang berada di dalam negeri ditambah milik bangsa asing di dalam negeri.

3.3.2.2 Inflasi

Mankiw (2007), mendefinisikan inflasi sebagai suatu peningkatan tingkat harga-harga menyeluruh dalam perekonomian. Sedangkan Rodoni (2008), mendefinisikan Inflasi adalah keadaan dimana terjadi peningkatan harga secara terus menerus. Inflasi merupakan gejala ekonomi yang sangat menarik untuk diperhatikan. Inflasi merupakan masalah yang selalu mendapat perhatian pemerintah.

Tujuan adalah menjaga agar tingkat inflasi selalu berada pada tingkat yang sangat rendah.

Perhitungan inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan IHK. IHK merupakan perhitungan dari rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Indeks ini merupakan salah satu indikator ekonomi yang secara umum dapat menggambarkan tingkat inflasi atau deflasi harga barang dan jasa (www.bps.go.id). Inflasi ini disimbolkan dengan huruf INF.

3.3.2.3 Rasio Margin Murabahah terhadap Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah

Rasio Margin Murabahah terhadap Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah adalah perbandingan antara return murabahah dibanding dengan return akad mudharabah dan musyarakah. Variabel ini dihitung terlebih dahulu menggunakan MS.Excel yang dinotasikan dengan simbol RR (*Rasio Return*) Perhitungan rasio ini sebagai berikut:

$$RR = \frac{\text{Presentase Margin Murabahah}}{\text{Presentase Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah}}$$

3.3.2.4 Rasio Alokasi Pembiayaan Murabahah terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah

Rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah perbandingan antara jumlah alokasi pembiayaan perbankan syariah pada akad murabahah dibanding dengan alokasi pembiayaan akad mudharabah dan musyarakah. Variabel ini dihitung menggunakan MS. excel dinotasikan dengan simbol RAP (Rasio Alokasi Pembiayaan). Perhitungan rasio ini sebagai berikut:

$$\text{RAP} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Murabahah}}{\text{Jumlah Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah}}$$

3.3.2.5 Financing to Deposit Ratio (FDR)

FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Perbankan Syariah. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut, semakin tinggi angka FDR suatu bank, digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibandingkan dengan bank yang memiliki angka rasio yang lebih kecil. Batas minimum FDR adalah 80% dan batas maksimum FDR adalah 110% (Prihatiningsih, 2012). FDR dihitung dengan satuan persen (%). FDR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Total DPK}} \times 100$$

3.4 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode koreksi kesalahan atau dikenal dengan nama *error correction model* (ECM), yaitu suatu teknik untuk mengoreksi ketidak seimbangan jangka pendek menuju pada keseimbangan jangka panjang (Nachrowi, 2006:371). Dengan kata lain, metode ECM merupakan metode analisis data yang memperlihatkan dan menjelaskan hubungan jangka panjang dan jangka pendek dari variabel penelitian yang disebabkan karena adanya ketidak seimbangan hubungan pada model dan ketidak normalan serta ketidak stasioneran data.

3.4.1 Persyaratan Analisis

Pada tahapan ini akan melalui berbagai pengujian, adapun pengujian yang dimaksud adalah sebagai berikut;

3.4.1.1 Uji Linieritas

Uji linieritas adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak (Insukindro, 2001: 100). Spesifikasi model yang digunakan merupakan hasil dari pemilihan model yang dianggap tepat sesuai dengan landasan teori. Akan tetapi dalam prakteknya seringkali model yang dipilih belum tepat digunakan dalam penelitian, sehingga perlu adanya deteksi terhadap model tersebut. Pendeteksian terhadap model tersebut ditunjukkan oleh uji linieritas, dan dari uji ini akan diperoleh informasi mengenai bentuk model empiris dan menguji variabel yang relevan untuk dimasukkan dalam model empiris.

Untuk mengetahui suatu model linier atau tidak, dapat dilakukan dengan cara Uji Ramsey (RESET), yaitu suatu pengujian yang dikembangkan oleh Ramsey dengan mengembangkan uji secara umum kesalahan spesifikasi atau dikenal dengan sebutan uji kesalahan spesifikasi regresi (*Regression Specification Error Test = RESET*) (A. Widarjono, 2009:170-171). Dalam pengujian Ramsey (RESET) ini, yang perlu diperhatikan adalah nilai F hitung, dengan hipotesis :

H_0 = Model tidak linier

H_1 = Model linier

Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F kritisnya pada α tertentu berarti signifikan, maka hipotesis H_0 diterima, artinya model kurang tepat atau tidak linier. Sebaliknya, apabila nilai F hitung lebih kecil dari nilai F kritisnya pada α tertentu, berarti tidak signifikan dan menolak hipotesis H_0 yang menyatakan bahwa model tidak linier.

Selain itu, pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria :

- Bila probabilitas $obs * R^2 \geq 0,05$ maka signifikan, H_0 ditolak (model linier)
- Bila probabilitas $obs * R^2 < 0,05$ maka tidak signifikan H_0 ditolak (model tidak linier).

3.4.1.2 Uji Perilaku Data

Uji perilaku data merupakan pengujian yang dilakukan terhadap data *time series* sebelum dilakukan pemodelan, pengujian ini meliputi uji linieritas, uji

stasioneritas, uji derajat integrasi, dan uji kointegrasi. Uji perilaku data dilakukan untuk melihat linieritas data yang menunjukkan spesifikasi model dan stasioner atau tidaknya data-data pada level yang menunjukkan hubungan seimbang atau tidaknya pada jangka pendek serta untuk melihat adanya hubungan jangka panjang pada data penelitian. Tahapan dari uji perilaku data ini adalah:

1. Uji Stasioneritas

Proses yang bersifat random atau stokastik merupakan kumpulan dari variabel random dalam urutan waktu. Setiap data *time series* yang kita punyai merupakan suatu data dari hasil proses stokastik. Suatu data hasil proses random dikatakan stasioner jika memenuhi kriteria, yaitu: jika rata-rata dan varian konstan sepanjang waktu dan kovarian antara dua data runtun waktu hanya tergantung dari kelambanan antara dua periode waktu tertentu (Widarjono, 2009:354).

Data yang stasioner pada dasarnya tidak memiliki variasi yang terlalu besar selama periode observasi dan memiliki kecenderungan untuk mendekati nilai rata-ratanya (Insukindro, 2001:121). Untuk melihat data stasioner atau tidak, dalam penelitian ini digunakan uji akar unit (*unit root test*). Apabila hasil uji akar unit menunjukkan data belum stasioner pada level maka data penelitian akan dilakukan diferensiasi tingkat pertama (*first difference*) hingga data menjadi stasioner (uji derajat integrasi) dan terbebas dari regresi lancung.

- Uji Akar Unit (*unit root test*)

Uji akar unit merupakan pengujian yang formal dan dikenalkan oleh David Dickey dan Wayne Fuller. Menurut Nachrowi (2006:353), untuk mempermudah pemahaman tentang *unit root test*, maka perlu memahami model berikut :

$$Y_t = \rho Y_{t-1} + u_t$$

Jika $\rho = 1$, maka model menjadi *random walk* tanpa *trend*. Disini akan menghadapi masalah dimana varian Y_t tidak stasioner. Dengan demikian, Y_t dapat disebut mempunyai *unit root* atau data tidak stasioner.

Pengujian akar unit dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan stasioner atau tidak. Data yang stasioner adalah data *time series* yang tidak mengandung akar unit dan sebaliknya. Untuk mengetahui hal tersebut, dapat dilakukan dengan uji *Dickey-Fuller* dan uji *Philips-Perron* (PP) yang merupakan bagian dari uji akar unit.

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui ada atau tidaknya akar unit pada data penelitian dilakukan dengan menggunakan uji *Augmented Dicky-Fuller*. Kelebihan metode ini adalah mengasumsikan bahwa proses terbentuknya *error term* dari suatu variable tidak mengikuti suatu fungsi tertentu. Hal ini berarti prosedur ADFtest dapat secara luas diterapkan sepanjang tidak ada keharusan mengasumsikan bahwa *error term* memiliki bentuk fungsional tertentu. Pengujian ADF memasukkan unsur adanya autokorelasi didalam variabel gangguan dengan memasukkan variabel independen berupa kelambanan diferensi (Widarjono, 2009:322) dan dapat diformulasikan

sebagai berikut :

$$\Delta Y_t = \gamma Y_{t-1} + e_t \dots \dots \dots (1)$$

$$\Delta Y_t = \alpha_0 + \gamma Y_{t-1} + e_t \dots \dots \dots (2)$$

Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah : $H_0 : \gamma = 0$ = data tidak stasioner

$$H_1 : \gamma \neq 0 = \text{data stasioner}$$

Hipotesis diatas menjelaskan bahwa apabila hasil uji *Augmented Dicky-Fuller* menyatakan nilai ADF statistik lebih negatif atau lebih besar dari pada nilai *critical value* pada derajat kepercayaan tertentu ($\alpha = 1\%$, 5% , dan 10%), maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa data tersebut tidak stasioner ditolak. Dan sebaliknya, bila nilai ADF statistik lebih kecil pada nilai *critical value* pada derajat kepercayaan tertentu ($\alpha = 1\%$, 5% , dan 10%), maka hipotesis nol diterima. Apabila diketahui bahwa data tidak stasioner, maka data harus distasionerkan melalui proses differensiasi data, atau dikenal dengan uji derajat integrasi.

2. Uji Derajat Integrasi

Pengujian derajat integrasi dilakukan apabila uji stasioneritas dengan menggunakan *unit root test* pada level menunjukkan bahwa data tidak stasioner, sehingga perlu distasionerkan dengan cara mendiferensiasikan data variabel penelitian. Seperti halnya uji akar unit diatas, uji derajat integrasi-pun dilihat dengan menggunakan uji *Augmented Dicky-Fuller* dengan formulasi dasar:

$$\Delta^2 Y_t = \gamma \Delta Y_{t-1} + e_t \dots \dots \dots (3)$$

$$\Delta 2Y_t = a_0 + y\Delta Y_{t-1} + e_t \dots \dots \dots (4)$$

$$\Delta 2Y_t = a_0 + a_1T + y\Delta Y_{t-1} + e_t \dots \dots \dots (5)$$

Dimana :

$$\Delta 2Y_t = \Delta Y_t - \Delta Y_{t-1} \dots \dots \dots (6)$$

Seperti pada uji akar unit sebelumnya, keputusan sampai pada derajat keberapa suatu data akan stasioner dapat dilihat dengan membandingkan antara nilai statistic ADF (PP) yang diperoleh dari koefisien γ dengan nilai kritis distribusi statistic Mackinnon (A. Widarjono, 2009:324). Dengan hipotesis:

$H_0 : \gamma = 0 = \text{ADF (PP) value} < \text{Nilai Kritis} = \text{data tidak stasioner}$
 $H_1 : \gamma \neq 0 = \text{ADF (PP) value} > \text{Nilai Kritis} = \text{data stasioner}$

Apabila nilai statistik ADF (PP) lebih besar atau lebih negatif dari nilai kritisnya (*critical value*) pada differensiasi tingkat pertama (*first difference*) maka H_0 ditolak, artinya data telah stasioner. Akan tetapi, bila nilai statistik ADF (PP) lebih kecil dari nilai kritisnya pada diferensiasi tingkat pertama maka H_0 diterima dan menunjukkan bahwa data tidak stasioner pada *first difference*, sehingga perlu dilakukan diferensiasi tingkat yang lebih tinggi lagi (*second difference*) sehingga data menjadi stasioner.

3. Uji Kointegrasi

Kointegrasi berkaitan erat dengan pengujian terhadap kemungkinan adanya hubungan keseimbangan jangka panjang antara variabel-variabel ekonomi seperti yang dikehendaki oleh teori ekonomi (Insukindro, 2001:121). Uji kointegrasi dari

dua atau lebih data *time series* menunjukkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang diantaranya. Data *time series* dikatakan terkointegrasi jika residu dari tingkat regresi stasioner, maka tingkat regresi akan memberikan estimasi yang tepat untuk hubungan jangka panjang.

Dalam melihat suatu model yang memiliki kointegrasi atau tidak, dapat dilakukan dengan menjalankan uji sebagai berikut :

- Uji Johansen
- Uji CRDW
- Uji EG

Dalam penelitian ini, untuk melihat ada atau tidaknya kointegrasi, dilakukan dengan uji *Engle-Granger* (EG) atau uji *Augmented Engle-Granger* yaitu pengujian yang dilakukan dengan memanfaatkan Uji *Augmented Dicky-Fuller* dengan cara mengestimasi model regresi kemudian menghitung nilai residual-nya. Apabila nilai residual-nya stasioner maka regresi tersebut merupakan regresi kointegrasi (Nachrowi, 2006:367). Dengan kata lain, pengujian *Augmented Dicky-Fuller* dari nilai residual menghasilkan estimasi nilai statistik ADF kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya.

Adapun proses pengujiannya adalah sebagai berikut :

- Mengestimasi model regresi
- Mencari nilai residualnya dan menghitungnya

Setelah mendapat nilai residualnya, maka akan dilakukan uji DF-ADF yang

merupakan pengujian *Engle-Granger* untuk memperoleh hasil apakah model penelitian tersebut terkointegrasi atau tidak, maka hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$H_0 = ADF \text{ value} < \text{Nilai Kritis} = \text{model tidak terkointegrasi} \quad H_1 = ADF \text{ value} >$$

Nilai Kritis = model terkointegrasi

3.4.1.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik atau dikenal dengan uji data, pengujian asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria BLUE (*best linier unbiased estimator*). Uji asumsi klasik terdiri dari, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji normalitas.

1) Uji Multikolinieritas

Salah satu uji asumsi klasik adalah tidak ada hubungan linier antar variabel independen. Adanya hubungan antar variabel independen dalam satu regresi disebut dengan multikolinieritas (Widarjono, 2009:103). Dengan demikian, multikolinieritas dapat diartikan sebagai hubungan linier antar variabel independen yang terjadi pada suatu regresi. Terjadinya multikolinieritas dalam suatu hasil regresi penelitian tidak dapat dihindari, artinya sulit untuk menemukan dua variabel bebas yang secara matematis tidak berkorelasi sejalipun secara substansi tidak berkorelasi.

Multikolinieritas adalah situasi dimana terdapat korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan lainnya. Hubungan linier antara variabel independen dapat terjadi dalam bentuk hubungan linier yang sempurna (*perfect*) dan hubungan

linier yang kurang sempurna (imperfect). Salah satu cara mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas adalah dengan uji korelasi. Pada uji korelasi, kita menguji multikolinieritas hanya dengan melihat hubungan secara individual antara satu variabel independen dengan satu variabel independen yang lain. Tetapi multikolinieritas bisa juga muncul karena satu atau lebih variabel independen merupakan kombinasi linier dengan variabel independen lain. Dalam penelitian ini peneliti akan multikolinieritas dengan menguji koefisien korelasi antarvariabel independen. Sebagai aturan (rule of thumb), jika koefisien korelasi cukup tinggi katakanlah diatas 0,85 maka diduga ada multikolinieritas dalam model. Sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah maka diduga model tidak mengandung multikolinieritas.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Salah satu asumsi penting OLS adalah varian dari residual adalah konstan. Namun dalam kenyataannya seringkali varian residual adalah tidak konstan atau disebut dengan heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas biasanya terdapat pada data cross section. Sementara itu data time series jarang mengandung unsur heteroskedastisitas, dikarenakan ketika menganalisis perilaku data yang sama dari waktu ke waktu fluktuasinya akan relatif lebih stabil (Widarjono, 2009:146).

Untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, dapat dilakukan dengan berbagai uji dibawah ini, yaitu:

- Metode Grafik
- Uji Arch
- Uji Glejser
- Uji Korelasi Spearman
- Uji Goldfeld-Quandt
- Uji Bruesch-Pagan-Godfrey
- Uji White.

Dari uji yang dipaparkan diatas, untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model, peneliti menggunakan uji *White*.

3) Uji Autokorelasi

Secara harfiah autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi metode OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu residual dengan residual yang lainnya. Sedangkan salah satu asumsi penting metode OLS berkaitan dengan residual adalah tidak adanya hubungan antara residual satu dengan residual yang lain (Widarjono, 2009:177).

Untuk mengidentifikasi pada suatu model apakah terdapat autokorelasi atau tidak digunakan Uji Durbin-Watson, yaitu salah satu uji yang banyak digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, durbin-watson dilambangkan

dengan d nilai ini akan berada dikisaran 0 – 4, pengambilan keputusan pada durbin-watson yaitu :

- Bila $(d_u) > DW$ ($4-d_u$) maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
- Bila $DW < d_l$, maka koefisien autokorelasi lebih besar dari nol, berarti ada autokorelasi positif.
- Bila $DW > (4-d_l)$, maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol berarti ada autokorelasi negatif.
- Bila $(d_u) > DW > (4-d_u)$ atau $(4-d_l) > DW > (4-d_l)$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

Selain itu, uji yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM. Apabila nilai probability Obs*R-squared lebih besar dari taraf nyata maka tidak ditemukan gejala autokorelasi pada model, tetapi jika nilai probability Obs*R-squared lebih kecil dari taraf nyata maka ditemukan gejala autokorelasi pada model.

4) Uji Normalitas

Uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui uji t hanya akan valid jika residual yang akan kita dapatkan mempunyai distribusi normal. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi apakah residual mempunyai distribusi normal. Salah satunya dengan metode uji Jarque-Bera. Uji normalitas residual metode OLS secara formal dapat dideteksi dari

metode yang dikembangkan oleh *Jarque-Bera (J-B)*. Metode JB ini didasarkan pada sampel besar yang diasumsikan bersifat *asymptotic*. Uji statistik dari JB ini menggunakan perhitungan *skewness* dan *kurtosis*.

Jika residual terdistribusi secara normal maka diharapkan nilai statistik JB akan sama dengan nol. Nilai statistik JB didasarkan pada distribusi *chi squares* dengan derajat kebebasan (df) = 2. Jika nilai probabilitas ρ dari statistik besar atau sama dengan kata lain jika nilai statistik JB tidak signifikan maka kita gagal menolak hipotesis bahwa residual mempunyai distribusi normal karena nilai statistic JB mendekati nol. Sebaliknya jika nilai probabilitas ρ dari statistik JB kecil atau signifikan maka kita menolak hipotesis bahwa residual mempunyai distribusi tidak normal karena nilai statistik JB tidak sam dengan nol.

3.4.1.4 Uji *Error Correction Model (ECM)*

Model Koreksi Kesalahan (*Error Correction Model*) merupakan metode pengujian yang dapat digunakan untuk mencari model keseimbangan dalam jangka panjang. Untuk menyatakan apakah model ECM yang digunakan sah atau tidak maka koefisien *Error Correction Term (ECT)* harus signifikan. Jika koefisien ini tidak signifikan maka model tersebut tidak cocok dan perlu dilakukan perubahan spesifikasi lebih lanjut. (Insukindro, 1993: 12-16).

Error correction model atau yang dikenal dengan model koreksi kesalahan adalah suatu model yang digunakan untuk melihat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut

Sargan, Engel, dan Granger, *ECM* adalah teknik untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang, serta dapat menjelaskan hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas pada waktu sekarang dan waktu lampau.

Dalam penelitian ini, model *ECM* yang digunakan telah terbebas dari ketidakstasioneritasan model melalui uji stasioneritas, uji derajat integrasi, uji kointegrasi dan uji asumsi klasik, sehingga model *ECM* yang digunakan sudah layak untuk dipakai dan di analisis. Analisis yang digunakan bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Proses menuju model *ECM* yang layak digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan jangka pendek dan jangka panjangnya, yaitu sebagai berikut , model ekonometrik:

$$Y = a + b_1 Dx_1 + b_2 Dx_2 + b_3 Dx_3 + b_n Dx_n \dots \dots \dots (7)$$

Berdasarkan pada model diatas, maka Model *ECM* pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{DNPF} = & a + \beta_1 D(\text{LOG}(\text{GDP})) + \beta_2 \text{DINF} + \beta_3 \text{DRR} + \beta_4 \text{DRAP} + \beta_5 \text{DFDR} \\ & + \beta_6 \text{ECT} \dots \dots \dots (8) \end{aligned}$$

Keterangan :

a = Konstanta

β = Koefisien regresi

$DNPF = NPF - NPF_{t-1}$ (*Non Performing Finance* (pembiayaan bermasalah))

$D(\text{LOG}(\text{GDP})) = \text{LOGGDP} - \text{LOGGDP}_{t-1}$ (*Gross Domestic Product*)

$DINF = INF - INF_{t-1}$ (Inflasi)

$DRR = RR - RR_{t-1}$ (Rasio *Margin* Murabahah terhadap Bagi Hasil
Mudharabah dan Musyarakah)

$DRAP = RAP - RAP_{t-1}$ (Rasio Alokasi Pembiayaan Murabahah terhadap
Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah)

$DFDR = FDR - FDR_{t-1}$ (*Financing to Depocit Ratio*)

$ECT = \text{Error Correction Term}$ (koreksi kesalahan)

1. Uji t

Uji t merupakan pengujian terhadap variabel independen secara parsial (individu) dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pada penelitian kali ini penulis menggunakan uji hipotesis satu sisi, karena memiliki landasan teori atau dugaan kuat terhadap hubungan tiap variabel.

Berikut bentuk pengujian hipotesisnya :

$H_0 : \beta_1 = 0$: artinya bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_1 \neq 0$: artinya bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Maka keputusan yang dibuat dengan α (probabilitas menolak hipotesis yang

benar) 5% adalah :

- 1) jika nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) jika nilai $t_{hitung} < \text{nilai } t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan menolak H_a , artinya bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Uji F

Uji F merupakan pengujian untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Cara pengujian hampir sama dengan uji t:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$: artinya secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$: artinya secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen maka keputusan yang dibuat dengan α (probabilitas menolak hipotesis yang benar) 5% adalah :

- 1) jika nilai $F_{hitung} > \text{nilai } F_{tabel}$ maka H_0 ditolak atau menerima H_1 artinya bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) jika nilai $F_{hitung} < \text{nilai } F_{tabel}$ maka H_0 diterima atau menolak H_1 .
Dalam kasus ini artinya bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3. Koefisien Determinasi (R^2). R^2 atau koefisien determinasi digunakan untuk

menghitung seberapa besar presentase total variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel-variabel bebas. Atau dengan kata lain koefisien regresi menerangkan bagaimana garis regresi yang dibentuk sesuai dengan datanya (Widarjono, 2009:38).



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data

4.1.1 Uji Linieritas

Uji linieritas merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah model fungsi regresi yang digunakan sudah benar atau tidak. Pengujian ini merupakan pengujian seleksi model fungsi regresi, yaitu model linier, model semi-log, dan model double log. Dalam penelitian ini digunakan model linier karena model regresi linier tidak mempunyai batas akibat perubahan nilai variabel bebasnya. Akan tetapi bila dilihat model logaritma, ternyata mempunyai batas minimum dan maksimal (Nachrowi 2006 : 64).

Langkah-langkah pengujian hipotesisnya sebagai berikut:

H₀ : model tidak linier

H₁ : model linier

Pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria :

- Bila probabilitas $obs \cdot R^2 \geq 0,05$ maka signifikan, H₀ ditolak (model linier)
- Bila probabilitas $obs \cdot R^2 < 0,05$ maka tidak signifikan H₀ ditolak (model tidak linier).

Tabel 4.1.1 Hasil Uji Linieritas

Ramsey RESET Test

	Value	df	Probability
t-statistic	1,152820	63	0,2533
F-statistic	1,328994	(1, 63)	0,2533
Likelihood ratio	1,482176	1	0,2234

Sumber: Output EViews (diolah kembali)

Dari uji linieritas dengan Ramsey RESET Test pada tabel 4.1 di atas diperoleh probabilitas sebesar 0,2533 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, yang artinya tidak ada permasalahan linieritas, maka H_0 ditolak = model linier.

4.1.2 Uji Stasioneritas

Sebelum melakukan uji ECM, yang pertama dilakukan adalah mengetahui apakah variabel yang digunakan telah stasioner atau tidak. Bila data tidak stasioner maka akan diperoleh regresi yang palsu (*spurious*), yaitu regresi yang menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih yang terlihat signifikan secara statistik, tetapi pada kenyataannya tidak sebesar yang nampak dari regresi yang dihasilkan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah data *time series* yang digunakan stasioner atau tidak stasioner, digunakan uji akar unit (*unit roots test*). Uji akar unit dilakukan dengan menggunakan metode *Augmented Dickey Fuller* (ADF), dengan hipotesa sebagai berikut:

H_0 : terdapat unit root (data tidak stasioner)

H_1 : tidak terdapat unit root (data stasioner)

Hasil t statistik hasil estimasi pada metode akan dibandingkan dengan nilai *MacKinnon Critical Value* pada titik kritis 1%, 5%, dan 10%. Jika nilai t-statistik

lebih kecil dari nilai *MacKinnon Critical Value* maka H_0 diterima, artinya data terdapat *unit root* atau data tidak stasioner. Jika statistik lebih besar dari nilai *MacKinnon Critical Value* maka H_0 ditolak, artinya data tidak terdapat *unit root* atau data stasioner.

Tabel 4.1.2 Hasil Uji Akar Unit

Varibel	Uji Akar Unit					
	Level		1 st Difference		2 nd Difference	
	ADF	Prob	ADF	Prob	ADF	Prob
NPF	-2,274347	0,1831	-3,548383	0,0095	-1,498245	0,0001
GDP	-0,626293	0,8572	-9,702238	0,0000	-7,489916	0,0000
INF	-2,802051	0,0631	-5,446375	0,0000	-9,092045	0,0000
RR	-1,360370	0,1597	-9,609251	0,0000	-7,103934	0,0000
RAP	-0,972711	0,7586	-4,986009	0,0001	-1,301711	0,0001
FDR	-1,872535	0,3433	-8,463625	0,0000	-1,146140	0,0001

Sumber: Output EViews (diolah kembali)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua variabel tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner di tingkat *first difference*. Sehingga dapat dilanjutkan ke uji model selanjutnya.

4.1.3 Uji Kointegrasi

Setelah melakukan uji stasioneritas, langkah selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi pada data. Uji kointegrasi digunakan untuk member indikasi awal bahwa model yang digunakan memiliki hubungan jangka panjang. Hasil uji kointegrasi didapatkan dengan membentuk residual yang diperoleh dengan cara meregresikan variabel independen terhadap variabel dependen secara OLS. Residual tersebut harus

stasioner pada tingkat level untuk dapat dikatakan memiliki kointegrasi. Berikut hasil uji kointegrasi pada penelitian ini:

Tabel 4.1.3 Hasil Uji Kointegrasi

Uji Kointegrasi Model Y						
Variabel	Nilai ADF	Nilai Kritis MacKinnon			Prob	Ket
		1%	5%	10%		
ECT	-2,323259	-2,599934	-1,945745	-1,613633	0,0205	Stasioner

Sumber: Output EViews (diolah kembali)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa residual yang digunakan dalam penelitian ini stasioner. Seluruh residual telah stasioner pada tingkat level dengan tingkat kepercayaan 5%.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa regresi tersebut merupakan regresi yang terkointegrasi. Disamping itu kekhawatiran akan terjadinya regresi semu tidak terbukti dengan kondisi hasil uji stasioneritas dan uji kointegrasi. Implikasi dari hasil uji kointegrasi ini adalah perubahan-perubahan yang saling terkointegrasi dapat dikatakan mempunyai hubungan jangka panjang.

4.1.4 Uji Asumsi Klasik

Sebelum masuk pada uji regresi terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik pada data. Dibawah ini adalah hasil uji asumsi klasik yaitu uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji normalitas, dan uji multikolinieritas.

Tabel 4.1.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik			
Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	1,320893	Prob. F(6,64)	0,2609
Obs*R-squared	1,320893	Prob. Chi-Square(6)	0,2513
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	1,709754	Prob. F(2,62)	0.1893
Obs*R-squared	3,711203	Prob. Chi-Square(2)	0,1564
Normality Test			
Jarque-Bera	1,646823	Probability	0,438932

Sumber: Output EViews (diolah kembali)

1. Uji Heteroskedastisitas

Pendeteksian heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui Uji *White*.

Dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Hipotesis :

H_0 : tidak terjadi Heteroskedastisitas

H_1 : terjadi Heteroskedastisitas

Pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria :

- Bila probabilitas $Obs^*R < 0,05 \rightarrow H_0$ ditolak, terjadi heteroskedastisitas
- Bila probabilitas $Obs^*R \geq 0,05 \rightarrow H_0$ diterima, tidak terjadi heteroskedastisitas

Pada hasil olah data tabel 4.4 menunjukkan R-squared sebesar 1,320893 dan Prob. Chi-Square = 0,2513 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, yang artinya H_0 ditolak maka tidak ada permasalahan heteroskedastisitas.

2. Uji Autokorelasi

Pengujian terhadap autokorelasi dapat menggunakan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*, dapat diketahui dari hasil uji autokorelasi di atas F-statistik lebih besar dari $\alpha = 0,05$, yaitu hasil uji autokorelasi menunjukkan probabilitas sebesar 0,1564 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ sehingga persamaan yang dihasilkan tidak mempunyai masalah autokorelasi.

3. Uji Normalitas

Pada uji normalitas dengan menggunakan uji *Jarque-Bera* menunjukkan probabilitas sebesar 0,438932 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga persamaan dapat dikatakan terdistribusi normal.

4. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi, maka terdapat multikolinieritas dimana model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi pada regresi linier berganda, karena jumlah variabel bebasnya lebih dari satu. Sedangkan pada regresi sederhana, tidak mungkin adanya kasus ini disebabkan variabel bebasnya hanya terdiri satu variabel. Untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel independen atau tidak, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1.5 Hasil Uji Multikolinieritas

	RR	RAP	INF	FDR	GDP
RR	1	-0,334236	-0,142613	-0,066978	-0,180475
RAP	-0,334236	1	0,077895	0,6919	0,209192
INF	-0,142613	0,077895	1	0,189833	0,376535

FDR	-0,066978	0,6919	0,189833	1	0,042675
GDP	-0,180475	0,209192	0,376535	0,042675	1

Sumber: Output EViews (diolah kembali)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak terdapat kolineritas antar variabel independen. Hal ini menginformasikan model regresi ECM yang diajukan dapat dikatakan terbebas multikolinieritas karena nilai matriks korelasi (*correlation matrix*) dari semua variabel adalah kurang dari 0,85 sehingga terbebas multikolinieritas.

4.1.5 Model Regresi Jangka Pendek

Berikut ini hasil uji model regresi jangka pendek pada penelitian ini:

Tabel 4.1.6 Hasil Uji Model Jangka Pendek

Uji Model Jangka Pendek		
Variabel	Koefisien	Prob
C	-0,006608	0,8336
dLogGDP	-0,08888	0,9244
dINF	-0,00887	0,8459
dRR	0,033876	0,7289
dRAP	-2,508137	0,0219
dFDR	0,044843	0,0031
ECT(-1)	-0,239322	0,0193
R-squared		0,20595
Prob(F-statistic)		0,01871

Sumber: Output EViews (diolah kembali)

Dari hasil pengujian di atas maka diperoleh persamaan jangka pendek pada penelitian ini, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{DNPF} = & -0,006608 - 0,239322\text{ECT}(-1) - 0,08888\text{DLogGDP} - 0,00887\text{DINF} \\ & + 0,033876\text{DRR} - 2,508137\text{DRAP} + 0,044843\text{DFDR} \end{aligned}$$

ECM digunakan untuk menguji hubungan jangka pendek yang dilihat dari persamaan regresi dengan mengestimasi dinamika *Error Correction Term* (ECT). Dari hasil pengujian model di atas menunjukkan bahwa variabel RAP (Rasio Alokasi Pembiayaan Murabahah terhadap alokasi Mudharabah dan Musyarakah) dan FDR (*Financing to Depocit Ratio*) signifikan memberikan pengaruh terhadap variabel dependen yaitu NPF (*Non Performing Financing*). Sedangkan, variabel independen sisanya seperti GDP, Inflasi, dan RR (Rasio Margin Murabahah terhadap bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah) tidak signifikan memberikan pengaruh terhadap NPF. Secara bersama-sama dalam jangka pendek variabel independen (GDP, Inflasi, RR, RAP, FDR) mempengaruhi variabel dependen (NPF) sebesar 20,59%, sedangkan sisanya sebesar 79,41% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

4.1.6 Model Regresi Jangka Panjang

Berikut ini tabel pengujian model regresi jangka panjang pada penelitian ini:

Tabel 4.1.7 Hasil Model Jangka Panjang

Uji Model Jangka Panjang		
Variabel	Koefisien	Prob
C	-8,414302	0,0057
LogGDP	2,889727	0,0000
INF	-0,053348	0,1136
RR	-0,062841	0,6450
RAP	-3,391194	0,0000
FDR	0,051955	0,0003
R-squared		0,72754
Prob(F-statistic)		0,00000

Sumber: Output EViews (diolah kembali)

Dari hasil pengujian di atas maka diperoleh persamaan jangka panjang pada penelitian ini, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{NPF} = & - 8,414302 + 2,889727\text{LogGDP} - 0,053348\text{INF} - 0,062841\text{RR} \\ & - 3,391194\text{RAP} + 0,051955\text{FDR} \end{aligned}$$

Untuk pengujian model regresi jangka panjang dapat dilihat bahwa ada tiga variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu LogGDP, RAP, dan FDR berpengaruh signifikan terhadap NPF. Sedangkan dua variabel independen yaitu inflasi dan RR tidak berpengaruh terhadap NPF. Dari hasil uji jangka panjang ini juga dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel independen GDP, INF, RR, RAP, dan FDR mempengaruhi variabel dependen sebesar 72,75%, sedangkan sisanya 27,25% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

Hasil regresi secara umum cukup fit, terutama untuk jangka panjang. Nilai R^2 untuk model jangka pendek lebih rendah tetapi meningkat pada model jangka

panjang. R^2 pada model jangka pendek yang rendah kemungkinan disebabkan karena pembiayaan pada perbankan syariah bersifat jangka panjang sehingga kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi NPF relatif kecil.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan analisis data di atas didapatkan hasil untuk mengetahui adanya indikasi *moral hazard* pada penelitian ini dengan melihat uji hipotesis dan arah dari tiap variabel. Hasil dari olah data tersebut dapat dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.1 Moral hazard di Perbankan Syariah

Variabel	Signifikansi	Arah	Indikasi
Jangka Pendek			
D(LOG(GDP))	Tidak Signifikan	(-)	Tidak Berpengaruh
D(INF)	Tidak Signifikan	(-)	Tidak Berpengaruh
D(RR)	Tidak Signifikan	(+)	Tidak Berpengaruh
D(RAP)	Signifikan	(-)	Tidak Terdapat Indikasi <i>Moral Hazard</i>
D(FDR)	Signifikan	(+)	Tidak Terdapat Indikasi <i>Moral Hazard</i>
Jangka Panjang			
LOG(GDP)	Signifikan	(+)	Terdapat Indikasi <i>Moral Hazard</i>
INF	Tidak Signifikan	(-)	Tidak Berpengaruh
RR	Tidak Signifikan	(-)	Tidak Berpengaruh
RAP	Signifikan	(-)	Tidak Terdapat Indikasi <i>Moral Hazard</i>
FDR	Signifikan	(+)	Tidak Terdapat Indikasi <i>Moral Hazard</i>

Dari hasil analisis data dan rangkuman indikasi *moral hazard* di atas maka akan dijelaskan pembahasan pada setiap variabel independen sebagai berikut:

4.2.1 *Gross Domestic Product (GDP)*

Dari pengujian jangka pendek GDP dengan probabilitas sebesar 0.9244 tidak berpengaruh terhadap NPF, namun dalam jangka panjang GDP berpengaruh positif signifikan terhadap NPF dengan probabilitas sebesar 0.0000. Hal ini berarti dalam jangka panjang setiap kenaikan GDP sebesar satu persen mempengaruhi kenaikan NPF sebesar 2,88 persen. Selain interpretasi tersebut dari arah hasil pengujian hipotesis terdapat indikasi *moral hazard* yang ditunjukkan dari arah pengaruh positif variabel GDP terhadap NPF.

Kenaikan GDP menunjukkan kondisi ekonomi sedang meningkat, sebab dalam kondisi ini dunia bisnis sedang mengalami kemajuan dan berada pada kondisi yang menggeliat. Dalam keadaan dunia bisnis yang menggeliat dan kondisi ekonomi sedang meningkat seharusnya kredit macet akan berkurang. Namun jika pada kondisi ekonomi sedang naik dengan ditandainya GDP yang meningkat, kemudian di sektor perbankan syariah NPF juga ikut mengalami kenaikan, maka di situ terjadi indikasi adanya *moral hazard* yang terjadi di perbankan syariah.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Anto dan Setyowati (2008) bahwa GDP tidak mempengaruhi NPF dalam jangka pendek namun memberikan pengaruh dalam jangka panjang. Wu, Chang, dan Zekiye (2003) juga menemukan bahwa kondisi makro ekonomi (direpresentasikan dengan GDP) dan kondisi pasar *real estate* signifikan terhadap NPF. Mereka juga menyebutkan bahwa berarti bank tidak cukup hati-hati dalam menyalurkan kredit. Dari hasil pengujian pada penelitian ini dan didukung dengan penelitian terdahulu memberikan indikasi

bahwa bank syariah masih kurang berhati-hati dalam penyalurkan dananya, terlebih untuk pembiayaan dalam jangka panjang yang memberikan efek risiko yang lebih besar.

Kondisi makro seperti GDP akan memberikan pengaruh jangka panjang yang besar sebab *social shock* yang terjadi akan cenderung lebih lama dialami suatu negara jika fluktuasi GDP terjadi dan memerlukan waktu yang lama untuk menstabilkan kondisi ekonomi secara makro (Case & Fair, 2007). GDP sebagai ukuran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat memberikan gambaran mengenai kondisi umum kesejahteraan masyarakat suatu negara. Menurut Keynes, faktor utama yang menentukan prestasi ekonomi suatu negara adalah pengeluaran agregat yang merupakan kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Daya beli ini tentu akan diikuti oleh kemampuan produksi suatu negara sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan. GDP sendiri mencerminkan kondisi suatu negara dapat dilihat mengalami kemajuan atau tidak dengan melihat pertumbuhan produksi suatu negara.

Kondisi ekonomi yang tumbuh dapat dilihat dari produktifitas masyarakat yang berada dalam kondisi sejahtera dan memiliki daya beli yang tinggi. Namun apabila pada kondisi masyarakat memiliki kemampuan bayar tinggi namun pembiayaan bermasalah meningkat menunjukkan bahwa bank masih kurang memiliki *prudential banking* untuk menganalisis adanya indikasi *moral hazard* yang dapat terjadi khususnya dalam jangka panjang. Hal ini muncul karena kurang prediksi jangka panjang yang dimiliki oleh bank syariah.

Selain itu, adanya inisiatif yang kurang untuk memenuhi tanggung jawab membayar pinjaman pembiayaan oleh nasabah bisa menghambat tingkat pengembalian pembiayaan yang telah disalurkan bank dan memicu meningkatnya kredit macet. Belum lamanya geliat bank syariah juga dapat menjadi pemicu masih terbatasnya bank syariah melihat kondisi ekonomi makro. Selain itu dimungkinkan karena pertumbuhan bank syariah yang masih relatif kecil di Indonesia, sehingga pada persentase yang masih minim ini bank syariah cenderung dapat terbawa oleh kondisi makro dan efek yang muncul dari kebijakan-kebijakan ekonomi makro.

4.2.2 Inflasi

Pada hasil pengujian hipotesis variabel inflasi di atas pada jangka pendek menunjukkan probabilitas sebesar 0,8459 dan probabilitas jangka panjang sebesar 0,1136 yang keduanya sama-sama lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yang berarti dalam jangka pendek maupun jangka panjang variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF. Sehingga, berapapun kenaikan atau penurunan variabel inflasi tidak akan berpengaruh terhadap kenaikan maupun penurunan NPF.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Poetry dan Sanrego (2011) menyatakan bahwa dalam jangka pendek variabel makro dan mikro tidak berpengaruh terhadap NPL dan NPF, sedangkan dalam jangka panjang variabel makro salah satunya inflasi dapat mempengaruhi NPL dan NPF di perbankan. Mereka juga menyatakan bahwa bank syariah lebih stabil menghadapi fluktuasi variabel makro n mikro.

Dari sini dapat dikatakan bahwa stabilitas perbankan syariah tidak mudah dipengaruhi oleh kenaikan maupun penurunan inflasi dikarenakan sistem perbankan syariah memakai sistem *profit loss sharing*, dan tidak semata-mata menggunakan suku bunga Bank Indonesia sebagai acuan. Sistem *profit loss sharing* pada perbankan syariah ini dari segi teori memang memiliki keunggulan dalam hal pembagian *return* dan *sharing risk*, sehingga bank syariah mampu bertahan dalam kondisi yang bergejolak sekalipun (Hakim, 2011) .

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah dan jangka panjang (Artikel Bank Indonesia, 2017).

Begitupun ketika menghadapi naik turunnya inflasi bank syariah tidak begitu terpengaruh sebab instrumen yang digunakan memiliki skim pembagian *profit* dan *risk* yang disesuaikan dengan persentase kontrak yang telah disepakati di awal. Sehingga ketika terjadi kendala baik kendala yang berasal dari turunnya pendapatan usaha maupun kendala yang diakibatkan kondisi sosial ekonomi, bank dan nasabah

akan menggunakan sistem kongsi untuk menanggung keuntungan atau kerugian bersama.

Seperti yang terjadi pada saat krisis 2008, IMF (International Monetary Fund) memperkirakan terjadinya perlambatan ekonomi dari 3,9% pada 2008 menjadi 2,2 pada tahun 2009 dan mengalami inflasi tinggi. Namun pada 2 bulan pertama 2009 pelayanan bank syariah justru mampu menambah 45 jaringan kantor. Kinerja pembiayaan bank syariah tetap tinggi sampai pada Februari 2009 dengan pembiayaan yang baik NPF perbankan syariah di bawah 5%. Penyaluran pembiayaan perbankan syariah juga mengalami peningkatan secara konsisten per Februari 2009 dengan pertumbuhan sebesar 33,3% pada Februari 2008 mencapai 47,3% pada Februari 2009. Sementara itu, nilai pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah mencapai Rp.40,2 triliun (Outlook BI dan Artikel BI).

Keutamaan lain dari sistem *profit and loss sharing* yang menjadi acuan bank syariah ini adalah bank syariah justru mampu membantu agar laju perekonomian lebih maju dengan pemberdayaan masyarakat lewat pembiayaan sektor riil. Bank syariah sendiri memiliki prinsip dasar bahwa penyaluran sektor riil akan lebih diutamakan untuk kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

4.2.3 Rasio Margin Murabahah terhadap Bagi Hasil Mudharabah Musyarakah (RR)

Pengujian hipotesis variabel RR (Rasio Margin Murabahah terhadap Bagi Hasil Mudharabah Musyarakah) menunjukkan probabilitas sebesar 0,7289 untuk

jangka pendek dan 0,6450 untuk jangka panjang lebih besar dari $\alpha = 0,05$, yaitu variabel RR tidak berpengaruh terhadap NPF. Hal ini berarti bahwa berapapun kenaikan atau penurunan variabel RR tidak akan berpengaruh terhadap NPF.

Return yang diberikan bank syariah kepada nasabah disesuaikan dengan risiko yang dihadapinya. Pada kasus ini *return* yang diberikan bank syariah tidak begitu mempengaruhi tingkat NPF sebagai indikator adanya *moral hazard* diperbankan syariah dimungkinkan karena bank syariah akan sangat berhati-hati memberikan *return* karena penetapan *return* bank syariah pun masih mengacu pada *return* yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Selain antisipasi yang dilakukan bank syariah dengan menetapkan *return* yang sesuai risiko juga sangat baik, dengan adanya suku bunga acuan pada bank sentral ini akan berdampak pada pembagian *return* yang tidak serta merta bisa diterapkan oleh bank syariah tanpa keikutsertaan bank sentral dalam mengantisipasi kemungkinan buruk yang timbul dari pemberian *return* bank syariah kepada nasabah. Walaupun bank syariah pada dasarnya memang mengacu pada prinsip-prinsip Islam namun pada faktanya di Indonesia pertumbuhannya juga masih sangat kecil dibanding bank konvensional yaitu kurang lebih 5% (Outlook OJK:2016), dan masih bergantung pada regulasi pada Bank Indonesia sebagai pemegang otorisasi perbankan di Indonesia.

4.2.4 Rasio Alokasi Pembiayaan Murabahah terhadap Alokasi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah (RAP)

Pada hasil pengujian untuk variabel RAP diatas menunjukkan probabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebesar 0,0219 dan 0,0000, dengan koefisien sebesar -2,508 dan -3,391. Keduanya berarti variabel RAP berpengaruh negatif terhadap NPF, dimana pada jangka pendek setiap kenaikan 1 persen variabel RAP berpengaruh menurunkan NPF sebesar 2,50 persen, dan dalam jangka panjang setiap kenaikan RAP 1 persen menurunkan pula NPF sebesar 3,39 persen. Dan dari arah hasil pengujian diperoleh arah yang sama dengan hipotesis yaitu negatif, hal itu berarti tidak ada indikasi *moral hazard* di perbankan syariah dengan ditunjukkan melalui hubungan variabel RAP dan NPF ini.

Dalam menyalurkan dana bank syariah akan berhati-hati untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian di masa depan baik untuk bank syariah sendiri maupun untuk nasabahnya. Selain itu, bank syariah dimungkinkan akan memilih lebih banyak menyalurkan dananya di sektor murabahah. Dari sisi risiko pembiayaan murabahah memiliki risiko yang lebih rendah daripada pembiayaan di sektor bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, sebab pembiayaan dengan prinsip bagi hasil memerlukan sistem yang harus lebih terperinci Anto dan Setyowati (2008). Bank syariah dan nasabah akan dipaksa untuk menyusun suatu desain kontrak yang optimal bagi kedua belah pihak, sebab keduanya akan berbagi risiko maupun hasil (Williamson, 1987).

Penyusunan sistem kontrak yang lebih optimal mendorong bank syariah cenderung memilih pembiayaan dengan skim murabahah agar lebih terhindar dari risiko-risiko yang dapat muncul dikemudian hari dari pembiayaan skim bagi hasil seperti mudharabah musyarakah. Namun, skema pembiayaan murabahah sendiri sebetulnya juga akan menimbulkan lambatnya pertumbuhan bank syariah dari segi sektor produktif yang cenderung dapat menghasilkan *benefit* yang besar lewat laju pembiayaan yang diberikan, dan juga dengan penyaluran dana pada sektor produktif ini tentunya bank syariah lebih dapat mengaplikasikan pesan moral Islam yang dibawa perbankan syariah dalam menjalankan sistem operasionalnya.

4.2.5 Financing To Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio sebagai variabel untuk mengetahui sejauh mana pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada sektor riil dari dana pihak ketiga yang telah dihimpun dapat juga menjadi variabel indikator sebuah bank terjadi indikasi *moral hazard* atau tidak. Dan dari pengujian pada penelitian ini menunjukkan dalam jangka pendek maupun jangka panjang FDR berpengaruh terhadap FDR dengan probabilitas sebesar 0,0031 dan 0,0003 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$, dengan koefisien masing-masing adalah 0,044 dan 0,051, artinya dalam jangka pendek setiap kenaikan FDR 1 persen menaikkan pula tingkat NPF sebesar 0,044 persen, dan dalam jangka panjang setiap kenaikan FDR 1 persen menaikkan pula tingkat NPF sebesar 0,052 persen. Dalam hubungan FDR dengan NPF diketahui bahwa tidak ada indikasi *moral hazard* yang terjadi di perbankan syariah.

Rasio *finance to deposit ratio* (FDR) dipergunakan untuk mengukur sejauh mana dana pinjaman yang berhasil dikerahkan oleh bank kepada nasabah peminjam yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka *Finance To Deposit Ratio* (FDR) suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang nilai *Finance To Deposit Ratio* (FDR) lebih kecil.

Menurut Mulyono (1995), rasio FDR merupakan rasio perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat (kredit) dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank (Dendawijaya, 2001). Bila FDR dilakukan secara masif bisa mengakibatkan meningkatnya risiko kredit macet, tetapi bila tingkat FDR rendah maka sektor riil juga tidak akan berkembang. Perbandingan kedua rasio ini dapat tercermin melalui kenaikan atau penurunan rasio antara FDR dan NPF di bawah ini. Dimana fluktuasi rasio FDR diikuti pula dengan fluktuasi persentase NPF perbankan syariah.

Tabel 4.2.2 FDR dan NPF Perbankan Syariah

	Tahun 2014		Tahun 2015			
	Nov	Des	Sep	Okt	Nov	Des
FDR	94,62%	91,50%	90,82%	90,67%	90,25%	88,03%
NPF	4,86%	4,33%	3,9%	3,98%	3,89%	3,49%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah

Namun, dari sisi operasional yang dijalankan oleh bank syariah tidak menunjukkan adanya indikasi *moral hazard* seperti penelitian yang dilakukan oleh

Padmanty dan Agus (2011) bahwa jumlah pendanaan Bank Islam (FDR) mempengaruhi tingkat pendanaan bermasalah (NPF). Oleh karena itu, kedua variabel ini memang berbanding lurus antara kenaikan/penurunan FDR akan menaikkan atau menurunkan rasio dari NPF. Peningkatan FDR juga akan meningkatkan kredit macet begitu pula sebaliknya. Pengaruh hipotesis dengan arah positif berlaku pada kedua variabel ini.

Dengan semakin giat bank menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dapat dimaknai bahwa bank syariah melakukan fungsinya sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit yang mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi (Siringoringo, 2012).

Bank merupakan *agent of development* yang bertugas sebagai lembaga keuangan yang memobilisasi dana guna pembangunan ekonomi, dan hal tersebut tidak lepas dari fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Dendawijaya (2009) mengatakan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*idle fund surplus*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan. Fungsi intermediasi suatu bank diukur dalam rasio, yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada bank syariah.

Dengan melihat risiko yang timbul dari kegiatan penyaluran dana perbankan syariah yaitu meningkatnya NPF seiring dengan meningkatnya FDR, hal ini lebih dimaknai sebagai suatu konsekuensi dari adanya kegiatan pendistribusian dana.

Bahwa pendistribusian dana juga akan diikuti oleh pendistribusian bagi hasil. Bagi hasil dalam konteks perbankan syariah sendiri memiliki makna bahwa kedua belah pihak berbagi risiko untung maupun rugi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel makro dan variabel internal perbankan syariah terhadap NPF, untuk melihat adanya indikasi *moral hazard* yang timbul di perbankan syariah. Dari hasil penelitian di bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam jangka pendek variabel GDP tidak berpengaruh terhadap NPF. Namun, untuk jangka panjang GDP berpengaruh positif signifikan terhadap NPF dan memiliki indikasi *moral hazard*. Fluktuasi GDP dalam jangka panjang mempunyai pengaruh lama pula bagi ekonomi negara, dan salah satu industri perekonomian yang akan merasakan dampak jangka panjang atas fluktuasi GDP adalah sektor perbankan syariah. Perbankan syariah yang masih tergolong skala kecil relatif mudah terbawa kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kondisi ekonomi makro, sesuai dengan teori bahwa indikator pertumbuhan ekonomi makro juga salah satunya direpresentasikan dari tingkat GDP suatu negara.
2. Dalam jangka pendek maupun jangka panjang inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF. Pada dasarnya sistem yang digunakan oleh bank syariah dengan prinsip bagi hasil menghindarkan pada transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif yang dapat menimbulkan ketidakstabilan perekonomian.

Meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah juga akan dapat merekatkan hubungan antara sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut

3. Dalam jangka pendek dan jangka panjang RR (Rasio margin murabahah terhadap bagi hasil mudharabah dan musyarakah) tidak berpengaruh terhadap NPF. Sebab, *return* yang diberikan bank syariah kepada nasabah disesuaikan dengan risiko yang dihadapinya. Kehati-hatian bank syariah memberikan *return* dan pemberian yang *return* yang masih mengacu pada tingkat pengembalian yang ditetapkan oleh Bank Indonesia menjadi faktor yang dapat menjaga bank syariah dalam manajemen *return* bagi hasil serta sebagai langkah agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan dan sifat kurang tanggung jawab bank maupun nasabah pembiayaan.
4. Dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang RAP (rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap mudharabah dan musyarakah) berpengaruh negatif terhadap NPF yang artinya dari variabel ini menunjukkan tidak ada indikasi *moral hazard* di perbankan syariah. Dalam menyalurkan dana bank syariah akan berhati-hati untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian di masa depan baik untuk bank syariah sendiri maupun untuk nasabahnya. Selain itu, bank syariah dimungkinkan akan memilih lebih banyak menyalurkan dananya di sektor murabahah. Dari sisi risiko pembiayaan murabahah memiliki risiko yang lebih rendah daripada pembiayaan di sektor bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, sebab

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil memerlukan sistem yang harus lebih terperinci

5. Dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang FDR berpengaruh positif signifikan terhadap NPF, yang berarti tidak terjadi indikasi *moral hazard* di perbankan syariah. Berjalannya fungsi bank syariah dalam penyalurkan ke sektor riil untuk lebih menggerakkan perekonomian lewat usaha produktif menjadi bukti bahwa bank syariah mulai menunjukkan perannya sebagai lembaga yang mengedepankan kepercayaan, tanggung jawab bersama, dan mencapainya kemaslahatan bersama dalam kerjasama. Dengan konsekuensi bahwa dalam kerjasama dibidang usaha tentu ada risiko yang dihadapi. Sesuai dengan rasio FDR dan NPF. Bahwa semakin tinggi FDR akan diikuti dengan semakin meningkatnya tingkat NPF bank syariah. Dan rasio matematis ini merupakan bentuk yang wajar dan seimbang dalam suatu kerjasama. Dan dalam usaha bersama hal yang penting adalah menjaga komitmen bersama dalam menanggung setiap risiko yang muncul dengan konsep *profit and loss sharing*.

5.2 Implikasi dan Saran

Dari penelitian ini terdapat beberapa saran yang muncul untuk perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasis Islam maupun untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari beberapa variabel yang menjadi indikator *moral hazard* perbankan syariah menunjukkan bahwa hanya 1 yang berindikasi *moral hazard* dalam jangka panjang. Diharapkan pemerintah justru lebih meningkatkan pertumbuhan bank syariah, sebab dengan porsi yang relatif masih kecil yaitu 5% bank syariah menunjukkan ketahanannya dalam mengantisipasi dan menghadapi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang muncul dalam setiap transaksi perbankan, hal ini perlu menjadi perhatian bahwa sebenarnya pertumbuhan bank syariah harus terus ditingkatkan agar mampu menekan kecenderungan *moral hazard*.
2. Namun, tetap perlunya kewaspadaan pada bank syariah yaitu dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan GDP dalam jangka panjang berpengaruh sekaligus memiliki indikasi adanya *moral hazard* di perbankan syariah, berkaitan dengan hal itu akan lebih baik jika bank syariah memberikan langkah yang preventif guna mencegah adanya tindakan-tindakan yang berindikasi *moral hazard* dan dapat menimbulkan kerugian pada perbankan maupun nasabah. Memperketat penagihan bagi nasabah yang telat bayar, memberikan edukasi lebih bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab lebih dalam membayar pinjaman bank, dan berusaha memberikan informasi setransparan mungkin pada saat menjelaskan produk yang akan diikuti nasabah agar tidak terjadi *asymmetry information* dan menimbulkan *moral hazard* di kemudian hari.

3. Semoga penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur bagi penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan penelitian lebih akurat, misalnya dengan menambah rentang waktu penelitian, membahas *moral hazard* dari sisi yang lebih dalam dengan data primer atau menambah variabel independen lainnya.



Referensi

Alqur'an Surah Al-Isra' Ayat: 26-27

Adiwarman. (2004). BI Intensifkan Pengawasan terhadap Perbankan Syariah. Kompas. Internet.

Anto dan Setyowati. (2007). *Indikasi Moral Hazard dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga: (Studi Komparatif Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Tahun 2003:1- 2007)*. Dalam Current Issues Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada.

Arikunto, Syharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arhami, Muhammad. (2005). *Konsep Sistem Pakar*. Yogyakarta: Andi Offset.

Arijanto, Agus. (2010). *Dosa-Dosa Orang Tua Terhadap Anak dalam Hal Finansial*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Case dan Fair. (2007). *Prinsip-prinsip Ekonomi*. Jakarta: Erlangga

Covitz dan Heitfield. (1999). Monitoring, Moral Hazard, and Market Power: a Model of Bank Lending. *Federal Deposit Insurance Corporation*.

Dendawijaya, Lukman. 2001. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Dow, James. (2000). What is Systemic Risk? Moral Hazard, Initial Shocks and Propagation. *IMES Discussion Paper Series 2000-E-17*.

D. Nachrowi, Nachrowi dan Usman. (2002). *Penggunaan Teknik Ekonometri*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dreher, Axel. (2004). Does the IMF cause Moral Hazard? A Critical Review of the Evidence. Internet.

Gujarati, Damodar. (2004). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.

Hakim, Maskanul C. (2011). *Belajar Mudah Ekonomi Islam*. Banten: Shuhuf Media Insani.

- Holmstrom, B. (2008). Moral Hazard and Observability. *The Bell Journal of Economics*, Vol.10, No.1.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI). (2009). *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Insukindro. (2001). *Ekonomi Uang dan Bank*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Ismal, Rifki. (2006). Assessing Moral Hazard Problem in Murabahah Financing. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Volume-5 Number-2.
- Kasmir. (2005). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Krugman, P. (1999). *What happened to Asia?, Conference paper in Japan*. South Western Publishing.
- Luiz, Silva dan Masaru. (2001). Can "Moral Hazard" Explain the Asians Crises?. Tokyo: ADB Institute
- Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mishkin, S. Frederic. (2001). *Prudential Supervision What Works and What Doesn't, NBER Conference Report*. Chicago: The University of Chicago Press
- Misra dan Dhal. (2009). Pro-cyclical Management of Banks' Non-Performing Loans by the Indian Public Sector Banks. Internet.
- Muhammad. (2004). *Managemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia. Edisi Pertama.
- Muljawan, Dadang. (2001). *Perbankan Syariah: Filosofi Operasi*. Biro Perbankan Syariah, Bank Indonesia.
- Morris, Golstein. (1998). The Asian Financial Crisis, Policy Brief 98-1. *Institute for International Economics*. Internet.

- Nasution, Mustafa Edwin dan Ranti Wiliasih. (2007). Profit Sharing dan Moral Hazard dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol. VII No. 02.
- Padmanty dan Agus. (2014). Analisis Variabel Yang Mempengaruhi Kredit Macet Perbankan di Indonesia. *Laporan Penelitian Insentif Regular Kompetitif UMS*.
- Padmanty dan Sanrego. (2008). Pengaruh Variabel Makro dan Mikro terhadap NPL Perbankan Konvensional dan NPF Perbankan Syariah. *Islamic Finance & Business Review*, Vol. 6 No.2.
- _____. *Perbankan Syariah: Lebih Tahan Krisis Global*. Artikel Bank Indonesia. www.bi.go.id
- Prihatiningsih. (2012). Dinamika FDR Perbankan Syariah Tahun 2006-2011. *Jurnal Orbith*, Vol. 8 No. 3.
- Wahyuni, Sri. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Tekun* Volume V, No. 02.
- Siringoringo, Renniwaty. (2012). Karakteristik dan Fungsi Intermediasi Perbankan di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.
- Scott, William R. (2000). *Financial Accounting Theory*. Second edition. Canada: Prentice Hall
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta
- Supranto, J. (2003). *Metode Riset dan Aplikasinya dalam Pemasaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Setiawan dan Bagaskara. (2016). Non-Performing Financing (NPF) and Cost Efficiency of Islamic Banks in Indonesia Period 2012Q1 to 2015Q2. *Sixth Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (API6Thai Conference)*.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. (2008). *Lembaga Keuangan*. Jakarta: Zikrul Hakim
- Widarjono, Agus. (2009). *Ekonometrika : Pengantar dan Aplikasinya (Dilengkapi dengan Aplikasi EViews)*. Yogyakarta: Ekonisia.

Williamson, SD. (1987). Recent Development in Modelling Financial Intermediation, in Lewis K., Mervyn dan Latifa M. Algaoud. (2001). *Islamic Banking*. Cheltenham. UK: Edward Elgar.

Wu, chang, dkk. (2003). Banking System, Real Estate Markets, And Non Performing Loans. *International Real Estate Review* Vol. 6 No. 1.

Yasin, Ach. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) di Industri bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia. *Akrual Jurnal Akuntansi* 5 183-203.

Lain-lain

Outlook OJK 2016

Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 2 Mei 1993

Statistik Perbankan Syariah, www.bi.go.id

Statistik Perbankan Syariah, www.ojk.go.id

www.bps.go.id

www.ekonomisyariah.org. OJK Targetkan Jakarta Jadi Pusat Keuangan Syariah. Akses 30 Desember 2016.

Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia. Diambil tanggal 24 Februari 2017 dari www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/contents/default.aspx.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Penelitian

NO	TAHUN	BULAN	NPF	GDP	INF	RR	RAP	FDR
1	2010	Januari	4.36	4.57	3.72	0.55	1.57	88.67
2		Februari	4.75	4.58	3.81	0.56	1.58	90.96
3		Maret	4.53	4.62	3.43	0.56	1.58	95.07
4		April	4.47	4.62	3.91	0.96	1.56	95.57
5		Mei	4.77	4.61	4.16	2.8	1.55	96.65
6		Juni	3.89	4.65	5.05	2.53	1.55	96.08
7		Juli	4.14	4.61	6.22	0.55	1.56	95.32
8		Agustus	4.10	4.62	6.44	0.55	1.55	95.86
9		September	3.95	4.53	5.80	0.55	1.57	95.40
10		Oktober	3.95	4.61	5.67	0.54	1.56	94.76
11		November	3.99	4.62	6.33	0.54	1.56	95.45
12		Desember	3.02	4.61	6.96	0.48	1.61	89.67
13	2011	Januari	3.28	4.62	7.02	0.49	1.63	91.97
14		Februari	3.66	4.59	6.84	0.49	1.67	95.16
15		Maret	3.60	4.66	6.65	0.49	1.72	93.22
16		April	3.79	4.63	6.16	0.48	1.78	95.17
17		Mei	3.76	4.66	5.98	0.49	1.80	94.88
18		Juni	3.55	4.67	5.54	0.49	1.79	94.93
19		Juli	3.75	4.70	4.61	0.5	1.81	94.18
20		Agustus	3.53	4.64	4.79	0.49	1.82	98.39
21		September	3.50	4.65	4.61	0.49	1.82	94.97
22		Oktober	3.11	4.68	4.42	0.5	1.87	95.24
23		November	2.74	4.62	4.15	0.5	1.90	94.40
24		Desember	2.52	4.63	3.79	0.5	1.93	88.94
25	2012	Januari	2.68	4.63	3.65	0.49	1.95	87.27
26		Februari	2.82	4.66	3.56	0.49	1.99	90.49
27		Maret	2.76	4.63	3.97	0.49	2.00	91.20
28		April	2.85	4.64	4.50	0.48	2.01	95.39
29		Mei	2.93	4.68	4.45	0.48	2.03	97.95
30		Juni	2.88	4.70	4.53	0.48	2.04	98.59
31		Juli	2.92	4.71	4.56	0.48	2.12	99.91

32		Agustus	2.78	4.61	4.58	0.46	2.16	101.03
33		September	2.74	4.70	4.31	0.47	2.15	102.10
34		Oktober	2.58	4.77	4.61	0.47	2.21	100.84
35		November	2.50	4.74	4.32	0.47	2.22	101.19
36		Desember	2.22	4.74	4.30	0.48	2.22	100.00
37	2013	Januari	2.49	4.74	4.57	0.46	2.23	100.63
38		Februari	2.72	4.72	5.31	0.47	2.27	102.17
39		Maret	2.75	4.72	5.90	0.47	2.27	102.62
40		April	2.85	4.74	5.57	0.47	2.22	103.08
41		Mei	2.92	4.75	5.47	0.49	2.18	102.08
42		Juni	2.64	4.73	5.90	0.5	2.15	104.43
43		Juli	2.75	4.75	8.61	0.43	2.13	104.83
44		Agustus	3.01	4.73	8.79	0.45	2.14	102.53
45		September	2.80	4.76	8.40	0.62	2.13	103.27
46		Oktober	2.96	4.77	8.32	0.48	2.08	103.03
47		November	3.08	4.76	8.37	0.49	2.06	102.58
48		Desember	2.62	4.77	8.38	0.47	2.07	100.32
49	2014	Januari	3.01	4.76	8.22	0.49	2.11	100.07
50		Februari	3.53	4.76	7.75	0.49	2.09	102.03
51		Maret	3.22	4.76	7.32	0.46	2.07	102.22
52		April	3.48	4.76	7.25	0.52	1.98	95.50
53		Mei	4.02	4.79	7.32	0.42	1.95	99.43
54		Juni	3.90	4.79	6.70	0.41	1.91	100.80
55		Juli	4.31	4.76	4.53	0.47	1.86	99.89
56		Agustus	4.58	4.79	3.99	0.42	1.85	98.99
57		September	4.67	4.85	4.53	0.43	1.82	99.71
58		Oktober	4.58	4.82	4.83	0.42	1.83	98.99
59		November	4.86	4.80	6.23	0.45	1.80	94.62
60		Desember	4.33	4.83	8.36	0.45	1.84	91.50
61	2015	Januari	4.05	4.81	6.96	0.54	1.82	88.85
62		Februari	4.21	4.78	6.29	0.54	1.82	89.37
63		Maret	3.99	4.83	6.38	0.55	1.78	89.15
64		April	3.83	4.85	6.79	0.56	1.75	89.56
65		Mei	3.97	4.81	7.15	0.58	1.71	90.05
66		Juni	3.99	4.84	7.26	0.57	1.68	92.56
67		Juli	4.12	4.81	7.26	0.58	1.68	90.13
68		Agustus	4.08	4.84	7.18	0.6	1.67	90.71
69		September	3.90	4.87	6.83	0.6	1.65	90.82

70		Oktober	3.98	4.88	6.25	0.58	1.65	90.67
71		November	3.89	4.87	4.89	0.58	1.65	90.25
72		Desember	3.49	4.84	3.35	0.57	1.62	88.03

Lampiran 2

Uji Linieritas Data

Ramsey RESET Test
Equation: UNTITLED
Specification: D(NPF) C D(FDR) D(GDP) D(INF) D(RAP) D(RR) ECT(-1)
Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	df	Probability
t-statistic	1.152820	63	0.2533
F-statistic	1.328994	(1, 63)	0.2533
Likelihood ratio	1.482176	1	0.2234

F-test summary:

	Sum of Sq.	df	Mean Squares
Test SSR	0.090830	1	0.090830
Restricted SSR	4.396539	64	0.068696
Unrestricted SSR	4.305710	63	0.068345

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	-1.988530	64
Unrestricted LogL	-1.247442	63

Unrestricted Test Equation:
Dependent Variable: D(NPF)
Method: Least Squares
Date: 25/01/17 Time: 21:00
Sample: 2010M02 2015M12
Included observations: 71

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.015342	0.036588	0.419314	0.6764
D(FDR)	0.035935	0.016468	2.182108	0.0328
D(GDP)	-0.102670	0.930171	-0.110378	0.9125
D(INF)	0.012020	0.048818	0.246223	0.8063
D(RAP)	-2.048618	1.137214	-1.801437	0.0764
D(RR)	0.039578	0.097184	0.407242	0.6852
ECT(-1)	-0.191995	0.107604	-1.784265	0.0792
FITTED^2	-1.408046	1.221393	-1.152820	0.2533

R-squared	0.222352	Mean dependent var	-0.012254
Adjusted R-squared	0.135947	S.D. dependent var	0.281243
S.E. of regression	0.261428	Akaike info criterion	0.260491
Sum squared resid	4.305710	Schwarz criterion	0.515441
Log likelihood	-1.247442	Hannan-Quinn criter.	0.361877
F-statistic	2.573366	Durbin-Watson stat	2.100513
Prob(F-statistic)	0.021295		

Lampiran 3

Uji Stasioneritas (NPF)

Null Hypothesis: NPF has a unit root
 Exogenous: Constant
 Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.274347	0.1831
Test critical values:		
1% level	-3.530030	
5% level	-2.904848	
10% level	-2.589907	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(NPF)
 Method: Least Squares
 Date: 21/01/17 Time: 11:34
 Sample (adjusted): 2010M05 2015M12
 Included observations: 68 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
NPF(-1)	-0.107197	0.047133	-2.274347	0.0264
D(NPF(-1))	-0.080444	0.116926	-0.687989	0.4940
D(NPF(-2))	-0.037980	0.116336	-0.326471	0.7452
D(NPF(-3))	0.392223	0.113488	3.456066	0.0010
C	0.358808	0.166831	2.150729	0.0353

R-squared	0.235413	Mean dependent var	-0.014412
Adjusted R-squared	0.186867	S.D. dependent var	0.282031
S.E. of regression	0.254318	Akaike info criterion	0.170225
Sum squared resid	4.074697	Schwarz criterion	0.333424
Log likelihood	-0.787638	Hannan-Quinn criter.	0.234889
F-statistic	4.849347	Durbin-Watson stat	1.916100
Prob(F-statistic)	0.001791		

Null Hypothesis: D(NPF) has a unit root
 Exogenous: Constant
 Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.548383	0.0095
Test critical values:		
1% level	-3.530030	
5% level	-2.904848	
10% level	-2.589907	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(NPF,2)
 Method: Least Squares
 Date: 21/01/17 Time: 11:35
 Sample (adjusted): 2010M05 2015M12
 Included observations: 68 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(NPF(-1))	-0.844627	0.238031	-3.548383	0.0007
D(NPF(-1),2)	-0.289033	0.182366	-1.584906	0.1179
D(NPF(-2),2)	-0.362984	0.116375	-3.119080	0.0027
C	-0.014052	0.031907	-0.440388	0.6611
R-squared	0.638601	Mean dependent var		-0.005000
Adjusted R-squared	0.621660	S.D. dependent var		0.426728
S.E. of regression	0.262478	Akaike info criterion		0.219722
Sum squared resid	4.409253	Schwarz criterion		0.350281
Log likelihood	-3.470537	Hannan-Quinn criter.		0.271453
F-statistic	37.69647	Durbin-Watson stat		1.876042
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 4

Uji Stasioneritas (GDP)

Null Hypothesis: GDP has a unit root
 Exogenous: Constant
 Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-0.626293	0.8572
Test critical values: 1% level	-3.528515	
5% level	-2.904198	
10% level	-2.589562	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(GDP)
 Method: Least Squares
 Date: 21/01/17 Time: 11:37
 Sample (adjusted): 2010M04 2015M12
 Included observations: 69 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GDP(-1)	-0.029316	0.046809	-0.626293	0.5333
D(GDP(-1))	-0.474629	0.120013	-3.954825	0.0002
D(GDP(-2))	-0.341938	0.117513	-2.909794	0.0049
C	0.145083	0.220735	0.657273	0.5133
R-squared	0.246185	Mean dependent var		0.003188
Adjusted R-squared	0.211393	S.D. dependent var		0.035293
S.E. of regression	0.031341	Akaike info criterion		-4.031552
Sum squared resid	0.063847	Schwarz criterion		-3.902039
Log likelihood	143.0886	Hannan-Quinn criter.		-3.980170
F-statistic	7.076009	Durbin-Watson stat		2.157368
Prob(F-statistic)	0.000346			

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root
 Exogenous: Constant
 Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-9.702238	0.0000

Test critical values:	1% level	-3.528515
	5% level	-2.904198
	10% level	-2.589562

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(GDP,2)
 Method: Least Squares
 Date: 21/01/17 Time: 11:37
 Sample (adjusted): 2010M04 2015M12
 Included observations: 69 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(GDP(-1))	-1.849034	0.190578	-9.702238	0.0000
D(GDP(-1),2)	0.354419	0.115276	3.074515	0.0031
C	0.006860	0.003846	1.783561	0.0791
R-squared	0.722453	Mean dependent var	-0.001014	
Adjusted R-squared	0.714043	S.D. dependent var	0.058338	
S.E. of regression	0.031196	Akaike info criterion	-4.054521	
Sum squared resid	0.064232	Schwarz criterion	-3.957386	
Log likelihood	142.8810	Hannan-Quinn criter.	-4.015985	
F-statistic	85.89893	Durbin-Watson stat	2.169062	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 5

Uji Stasioneritas (Inflasi)

Null Hypothesis: INF has a unit root
 Exogenous: Constant
 Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.802051	0.0631
Test critical values:		
1% level	-3.527045	
5% level	-2.903566	
10% level	-2.589227	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(INF)

Method: Least Squares
 Date: 25/01/17 Time: 20:39
 Sample (adjusted): 2010M03 2015M12
 Included observations: 70 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INF(-1)	-0.148947	0.053156	-2.802051	0.0066
D(INF(-1))	0.424775	0.114780	3.700788	0.0004
C	0.853499	0.318528	2.679511	0.0093
R-squared	0.212050	Mean dependent var		-0.006571
Adjusted R-squared	0.188529	S.D. dependent var		0.714968
S.E. of regression	0.644055	Akaike info criterion		1.999848
Sum squared resid	27.79210	Schwarz criterion		2.096212
Log likelihood	-66.99467	Hannan-Quinn criter.		2.038125
F-statistic	9.015366	Durbin-Watson stat		1.827058
Prob(F-statistic)	0.000341			

Null Hypothesis: D(INF) has a unit root
 Exogenous: Constant
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-5.446375	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.527045	
5% level	-2.903566	
10% level	-2.589227	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(INF,2)
 Method: Least Squares
 Date: 25/01/17 Time: 20:40
 Sample (adjusted): 2010M03 2015M12
 Included observations: 70 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(INF(-1))	-0.641705	0.117822	-5.446375	0.0000
C	-0.012560	0.080788	-0.155469	0.8769
R-squared	0.303728	Mean dependent var		-0.023286
Adjusted R-squared	0.293489	S.D. dependent var		0.803914
S.E. of regression	0.675723	Akaike info criterion		2.082090
Sum squared resid	31.04895	Schwarz criterion		2.146332

Log likelihood	-70.87314	Hannan-Quinn criter.	2.107608
F-statistic	29.66300	Durbin-Watson stat	1.799779
Prob(F-statistic)	0.000001		

Lampiran 6

Uji Stasioneritas (RR)

Null Hypothesis: RR has a unit root
 Exogenous: None
 Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.360370	0.1597
Test critical values:		
1% level	-2.598907	
5% level	-1.945596	
10% level	-1.613719	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(RR)
 Method: Least Squares
 Date: 21/01/17 Time: 11:40
 Sample (adjusted): 2010M04 2015M12
 Included observations: 69 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
RR(-1)	-0.074687	0.054902	-1.360370	0.1783
D(RR(-1))	0.178922	0.107541	1.663763	0.1009
D(RR(-2))	-0.464806	0.109044	-4.262562	0.0001

R-squared	0.283368	Mean dependent var	0.000145
Adjusted R-squared	0.261652	S.D. dependent var	0.335000
S.E. of regression	0.287856	Akaike info criterion	0.389792
Sum squared resid	5.468833	Schwarz criterion	0.486927
Log likelihood	-10.44783	Hannan-Quinn criter.	0.428329
Durbin-Watson stat	1.912681		

Null Hypothesis: D(RR) has a unit root
 Exogenous: None
 Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-9.609251	0.0000
Test critical values:		
1% level	-2.598907	
5% level	-1.945596	
10% level	-1.613719	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(RR,2)
 Method: Least Squares
 Date: 21/01/17 Time: 11:40
 Sample (adjusted): 2010M04 2015M12
 Included observations: 69 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(RR(-1))	-1.360824	0.141616	-9.609251	0.0000
D(RR(-1),2)	0.506298	0.105354	4.805694	0.0000
R-squared	0.592256	Mean dependent var		-0.000145
Adjusted R-squared	0.586170	S.D. dependent var		0.450302
S.E. of regression	0.289678	Akaike info criterion		0.388460
Sum squared resid	5.622176	Schwarz criterion		0.453217
Log likelihood	-11.40188	Hannan-Quinn criter.		0.414151
Durbin-Watson stat	1.938035			

Lampiran 7

Uji Stasioneritas (RAP)

Null Hypothesis: RAP has a unit root
 Exogenous: Constant
 Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-0.972711	0.7586
Test critical values:		
1% level	-3.527045	
5% level	-2.903566	
10% level	-2.589227	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(RAP)
 Method: Least Squares
 Date: 21/01/17 Time: 11:41
 Sample (adjusted): 2010M03 2015M12
 Included observations: 70 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
RAP(-1)	-0.014799	0.015214	-0.972711	0.3342
D(RAP(-1))	0.460741	0.108749	4.236724	0.0001
C	0.027903	0.028834	0.967730	0.3367
R-squared	0.218253	Mean dependent var		0.000571
Adjusted R-squared	0.194917	S.D. dependent var		0.031341
S.E. of regression	0.028121	Akaike info criterion		-4.262658
Sum squared resid	0.052985	Schwarz criterion		-4.166294
Log likelihood	152.1930	Hannan-Quinn criter.		-4.224381
F-statistic	9.352736	Durbin-Watson stat		2.197679
Prob(F-statistic)	0.000262			

Null Hypothesis: D(RAP) has a unit root
 Exogenous: Constant
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-4.986009	0.0001
Test critical values:		
1% level	-3.527045	
5% level	-2.903566	
10% level	-2.589227	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(RAP,2)
 Method: Least Squares
 Date: 21/01/17 Time: 11:42
 Sample (adjusted): 2010M03 2015M12
 Included observations: 70 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(RAP(-1))	-0.541848	0.108674	-4.986009	0.0000
C	4.78E-05	0.003362	0.014225	0.9887
R-squared	0.267717	Mean dependent var		-0.000571
Adjusted R-squared	0.256948	S.D. dependent var		0.032610

S.E. of regression	0.028110	Akaike info criterion	-4.277207
Sum squared resid	0.053733	Schwarz criterion	-4.212964
Log likelihood	151.7022	Hannan-Quinn criter.	-4.251689
F-statistic	24.86029	Durbin-Watson stat	2.189657
Prob(F-statistic)	0.000005		

Lampiran 8

Uji Stasioneritas (FDR)

Null Hypothesis: FDR has a unit root
 Exogenous: Constant
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.872535	0.3433
Test critical values:		
1% level	-3.525618	
5% level	-2.902953	
10% level	-2.588902	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(FDR)
 Method: Least Squares
 Date: 21/01/17 Time: 11:43
 Sample (adjusted): 2010M02 2015M12
 Included observations: 71 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
FDR(-1)	-0.099751	0.053271	-1.872535	0.0654
C	9.592849	5.134036	1.868481	0.0659

R-squared	0.048360	Mean dependent var	-0.009014
Adjusted R-squared	0.034568	S.D. dependent var	2.180480
S.E. of regression	2.142461	Akaike info criterion	4.389552
Sum squared resid	316.7196	Schwarz criterion	4.453290
Log likelihood	-153.8291	Hannan-Quinn criter.	4.414899
F-statistic	3.506386	Durbin-Watson stat	1.921037
Prob(F-statistic)	0.065370		

Null Hypothesis: D(FDR) has a unit root
 Exogenous: Constant
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-8.463625	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.527045	
5% level	-2.903566	
10% level	-2.589227	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(FDR,2)
 Method: Least Squares
 Date: 21/01/17 Time: 11:43
 Sample (adjusted): 2010M03 2015M12
 Included observations: 70 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(FDR(-1))	-1.025403	0.121154	-8.463625	0.0000
C	-0.041284	0.262213	-0.157443	0.8754
R-squared	0.513009	Mean dependent var		-0.064429
Adjusted R-squared	0.505847	S.D. dependent var		3.120681
S.E. of regression	2.193714	Akaike info criterion		4.437224
Sum squared resid	327.2419	Schwarz criterion		4.501467
Log likelihood	-153.3028	Hannan-Quinn criter.		4.462742
F-statistic	71.63296	Durbin-Watson stat		1.994205
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 9

Uji Kointegrasi

Null Hypothesis: ECT has a unit root
 Exogenous: None
 Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.323259	0.0205
Test critical values:		
1% level	-2.599934	
5% level	-1.945745	
10% level	-1.613633	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(ECT)
 Method: Least Squares
 Date: 25/01/17 Time: 20:54
 Sample (adjusted): 2010M06 2015M12
 Included observations: 67 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
ECT(-1)	-0.301354	0.129712	-2.323259	0.0235
D(ECT(-1))	-0.047341	0.146865	-0.322341	0.7483
D(ECT(-2))	0.003671	0.144211	0.025457	0.9798
D(ECT(-3))	0.262290	0.130715	2.006580	0.0492
D(ECT(-4))	-0.114329	0.125390	-0.911786	0.3654
R-squared	0.255470	Mean dependent var		-0.021534
Adjusted R-squared	0.207436	S.D. dependent var		0.291062
S.E. of regression	0.259121	Akaike info criterion		0.208655
Sum squared resid	4.162922	Schwarz criterion		0.373185
Log likelihood	-1.989958	Hannan-Quinn criter.		0.273760
Durbin-Watson stat	1.805585			

Lampiran 10

Uji Asumsi Klasik (Heteroskedastisitas)

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.320893	Prob. F(6,64)	0.2609
Obs*R-squared	7.823392	Prob. Chi-Square(6)	0.2513
Scaled explained SS	6.973334	Prob. Chi-Square(6)	0.3233

Test Equation:
 Dependent Variable: RESID^2
 Method: Least Squares
 Date: 25/01/17 Time: 21:06
 Sample: 2010M02 2015M12
 Included observations: 71

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.052642	0.018053	2.915958	0.0049
D(FDR)^2	0.003680	0.001457	2.526439	0.0140

D(GDP)^2	-3.310252	5.452943	-0.607058	0.5460
D(INF)^2	0.006640	0.009741	0.681651	0.4979
D(RAP)^2	-6.155033	8.537030	-0.720981	0.4735
D(RR)^2	0.002771	0.018004	0.153928	0.8782
ECT(-1)^2	-0.013686	0.070630	-0.193770	0.8470
R-squared	0.110189	Mean dependent var	0.061923	
Adjusted R-squared	0.026769	S.D. dependent var	0.092374	
S.E. of regression	0.091129	Akaike info criterion	-1.859694	
Sum squared resid	0.531488	Schwarz criterion	-1.636613	
Log likelihood	73.01914	Hannan-Quinn criter.	-1.770982	
F-statistic	1.320893	Durbin-Watson stat	2.039559	
Prob(F-statistic)	0.260870			

Lampiran 11

Uji Asumsi Klasik (Autokorelasi)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.709754	Prob. F(2,62)	0.1893
Obs*R-squared	3.711203	Prob. Chi-Square(2)	0.1564

Test Equation:

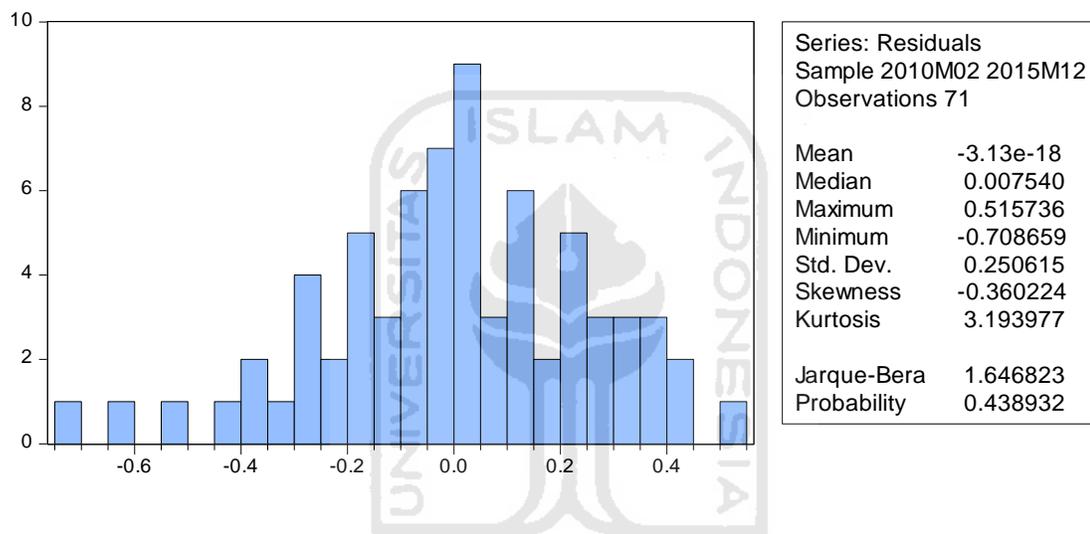
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 25/01/17 Time: 20:58
Sample: 2010M02 2015M12
Included observations: 71
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.001923	0.031025	0.061987	0.9508
D(FDR)	0.001981	0.015043	0.131696	0.8957
D(GDP)	-0.110274	0.931043	-0.118441	0.9061
D(INF)	-0.017021	0.045944	-0.370466	0.7123
D(RAP)	0.270988	1.097511	0.246911	0.8058
D(RR)	-0.000425	0.097873	-0.004342	0.9965
ECT(-1)	0.232591	0.159843	1.455118	0.1507
RESID(-1)	-0.366369	0.208808	-1.754570	0.0843
RESID(-2)	-0.219599	0.166483	-1.319048	0.1920
R-squared	0.052270	Mean dependent var	-3.13E-18	
Adjusted R-squared	-0.070017	S.D. dependent var	0.250615	

S.E. of regression	0.259240	Akaike info criterion	0.255850
Sum squared resid	4.166730	Schwarz criterion	0.542669
Log likelihood	-0.082673	Hannan-Quinn criter.	0.369909
F-statistic	0.427438	Durbin-Watson stat	1.788624
Prob(F-statistic)	0.900211		

Lampiran 12

Uji Asumsi Klasik (Normalitas)



Lampiran 13

Uji Asumsi Klasik (Multikolinieritas)

	RR	RAP	INF	FDR	GDP
RR	1.000000	-0.334236	-0.142613	-0.066978	-0.180475
RAP	-0.334236	1.000000	0.077895	0.691900	0.209192
INF	-0.142613	0.077895	1.000000	0.189833	0.376535
FDR	-0.066978	0.691900	0.189833	1.000000	0.042675
GDP	-0.180475	0.209192	0.376535	0.042675	1.000000

Lampiran 14

Uji ECM

(Jangka Pendek)

Dependent Variable: D(NPF)
Method: Least Squares
Date: 25/01/17 Time: 20:56
Sample (adjusted): 2010M02 2015M12
Included observations: 71 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.006608	0.031324	-0.210947	0.8336
D(FDR)	0.044843	0.014580	3.075720	0.0031
D(GDP)	-0.088880	0.932482	-0.095315	0.9244
D(INF)	-0.008870	0.045446	-0.195183	0.8459
D(RAP)	-2.508137	1.067802	-2.348878	0.0219
D(RR)	0.033876	0.097307	0.348130	0.7289
ECT(-1)	-0.239322	0.099720	-2.399933	0.0193
R-squared	0.205948	Mean dependent var		-0.012254
Adjusted R-squared	0.131505	S.D. dependent var		0.281243
S.E. of regression	0.262099	Akaike info criterion		0.253198
Sum squared resid	4.396539	Schwarz criterion		0.476279
Log likelihood	-1.988530	Hannan-Quinn criter.		0.341910
F-statistic	2.766540	Durbin-Watson stat		2.106652
Prob(F-statistic)	0.018710			

Lampiran 15

Uji ECM

(Jangka Panjang)

Dependent Variable: NPF
Method: Least Squares
Date: 25/01/17 Time: 20:51
Sample: 2010M01 2015M12
Included observations: 72

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.414302	2.942121	-2.859944	0.0057
FDR	0.051955	0.013757	3.776512	0.0003

GDP	2.889727	0.578264	4.997245	0.0000
INF	-0.053348	0.033268	-1.603570	0.1136
RAP	-3.391194	0.314552	-10.78102	0.0000
RR	-0.062841	0.135782	-0.462807	0.6450
<hr/>				
R-squared	0.727542	Mean dependent var	3.513194	
Adjusted R-squared	0.706901	S.D. dependent var	0.693791	
S.E. of regression	0.375609	Akaike info criterion	0.959117	
Sum squared resid	9.311400	Schwarz criterion	1.148839	
Log likelihood	-28.52821	Hannan-Quinn criter.	1.034646	
F-statistic	35.24787	Durbin-Watson stat	0.662819	
Prob(F-statistic)	0.000000			

